Makroekonomi Regional dan Industri Asuransi – Regional Jawa

TIM PENULIS

Ibrahim Kholilul Rohman – Senior Research Associate IFG Progress / SKSG, Universitas Indonesia
(ibrahim.kholilul@ifg.id)

Nada Serpina– Research Associate IFG Progress
(nada.serpina@ifg.id)

Silvi Asna Prestianawati - Dosen dan Peneliti Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Brawijaya
(silvi.febub@ub.ac.id)

Nayaka Artha Wicesa - Dosen dan Peneliti Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Brawijaya
(nayakaarthawicesa@ub.ac.id)



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
1. *EXECUTIVE SUMMARY* 1
2. PENDAHULUAN 5
2.1 Latar Belakang 5
2.2 Maksud dan Tujuan 9
3. *REGIONAL ECONOMIC LANDSCAPE* 10
3.1 Analisis Struktur Ekonomi Regional 10
3.1.1 Pertumbuhan PDRB Riil 10
3.1.2 PDRB per Kapita 11
3.1.3 Struktur Sektoral Ekonomi 13
3.2 Analisis Sosial dan Demografi 15
3.3 Analisis Ketenagakerjaan 18
3.4 Analisis Karakteristik Wilayah 19
4. *REGIONAL INSURANCE LANDSCAPE* 21
4.1 Premi Asuransi Jiwa dan Asuransi Umum per Wilayah 21
4.2 Klaim Asuransi Jiwa dan Asuransi Umum per Wilayah 24
4.3 Rasio Klaim 26
4.4 Penetrasi Asuransi Terhadap PDRB 30
4.5 Premi per Kapita 32
4.6 Status Kesehatan 33
5. ANALISIS *LINKAGE* ANTARA KINERJA MAKROEKONOMI REGIONAL DENGAN KINERJA INDUSTRI ASURANSI 36
5.1 Analisis PDRB Terhadap Premi 36
5.2 Analisis Investasi Terhadap Asuransi Umum 39
5.3 Analisis Tingkat Pengangguran Terhadap Asuransi Jiwa 41
5.4 Pertumbuhan PDRB, Premi, dan Klaim 42
5.5 Inflasi dan Rasio Klaim 44
5.6 Kredit Perbankan dan Asuransi 45

6. *PROVINCIAL INSURANCE MARKET DIAGNOSIS*..... 48
6.1 Provinsi DKI Jakarta: *Mature / High-Value Market*.....48
6.1.1 Lanskap Industri Asuransi Umum dan Jiwa di Provinsi DKI Jakarta.....48
6.1.2 Peluang dan Tantangan Asuransi di Provinsi DKI Jakarta 49
6.2 Provinsi Jawa Barat: *Industrial & Mass Market* 50
6.2.1 Lanskap Industri Asuransi Umum dan Jiwa di Provinsi Jawa Barat 50
6.2.2 Peluang dan Tantangan Asuransi di Provinsi Jawa Barat 51
6.3 Provinsi Jawa Tengah: *Emerging / Affordable Mass Market* 52
6.3.1 Lanskap Industri Asuransi Umum dan Jiwa di Provinsi Jawa Tengah 52
6.3.2 Peluang dan Tantangan Asuransi di Provinsi Jawa Tengah 53
6.4 Provinsi DI Yogyakarta: *Service, Education & Tourism Market* 54
6.4.1 Lanskap Industri Asuransi Umum dan Jiwa di Provinsi DI Yogyakarta.....54
6.4.2 Peluang dan Tantangan Asuransi di Provinsi DI Yogyakarta 55
6.5 Provinsi Jawa Timur: *Diversified Industry & Trade Market*.....56
6.5.1 Lanskap Industri Asuransi Umum dan Jiwa di Provinsi Jawa Timur 56
6.5.2 Peluang dan Tantangan Asuransi di Provinsi Jawa Timur 57
6.6 Provinsi Banten: *Industrial & High-Exposure Market* 58
6.6.1 Lanskap Industri Asuransi Umum dan Jiwa di Provinsi Banten 58
6.6.2 Peluang dan Tantangan Asuransi di Provinsi Banten.....59
7. SINTESIS DAN REKOMENDASI STRATEGIS WILAYAH DI PULAU JAWA..... 61

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kontribusi Sektoral 6 Provinsi di Pulau Jawa (%) 13
Tabel 3.2 Indeks Risiko Bencana Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2025 19
Tabel 4.1 Status Keluhan Kesehatan Penduduk Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2025 (%) 33
Tabel 4.2 Dampak Keluhan Kesehatan Penduduk Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2025 (%) 34
Tabel 6.1 Lanskap Industri Asuransi Umum dan Jiwa di Provinsi DKI Jakarta 48
Tabel 6.2 Peluang dan Tantangan Asuransi di Provinsi DKI Jakarta 49
Tabel 6.3 Lanskap Industri Asuransi Umum dan Jiwa di Provinsi Jawa Barat 50
Tabel 6.4 Peluang dan Tantangan Asuransi di Provinsi Jawa Barat 51
Tabel 6.5 Lanskap Industri Asuransi Umum dan Jiwa di Provinsi Jawa Tengah 52
Tabel 6.6 Peluang dan Tantangan Asuransi di Provinsi Jawa Tengah 53
Tabel 6.7 Lanskap Industri Asuransi Umum dan Jiwa di Provinsi DI Yogyakarta 54
Tabel 6.8 Peluang dan Tantangan Asuransi di Provinsi DI Yogyakarta 55
Tabel 6.9 Lanskap Industri Asuransi Umum dan Jiwa di Provinsi Jawa Timur 56
Tabel 6.10 Peluang dan Tantangan Asuransi di Provinsi Jawa Timur 57
Tabel 6.11 Lanskap Industri Asuransi Umum dan Jiwa di Provinsi Banten 58
Tabel 6.12 Peluang dan Tantangan Asuransi di Provinsi Banten 59
Tabel 7.1 Sintesis dan Rekomendasi Strategis Wilayah di Pulau Jawa 62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Jawa (%) 10
Gambar 3.2 PDRB per Kapita Provinsi di Pulau Jawa (dalam juta) 12
Gambar 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2025 16
Gambar 3.4 Persentase Tenaga Kerja Formal Provinsi di Pulau Jawa (%) 18
Gambar 4.1 Perkembangan Premi Asuransi Jiwa Provinsi di Pulau Jawa (dalam triliun) 22
Gambar 4.2 Perkembangan Premi Asuransi Umum Provinsi di Pulau Jawa (dalam triliun) 23
Gambar 4.3 Perkembangan Klaim Asuransi Jiwa Provinsi di Pulau Jawa (dalam triliun) 24
Gambar 4.4 Perkembangan Klaim Asuransi Umum Provinsi di Pulau Jawa (dalam triliun) 25
Gambar 4.5 Rasio Klaim Asuransi Jiwa Provinsi di Pulau Jawa (%) 27
Gambar 4.6 Rasio Klaim Asuransi Umum Provinsi di Pulau Jawa (%) 29
Gambar 4.7 Penetrasi Asuransi Terhadap PDRB Provinsi di Pulau Jawa (%) 31
Gambar 4.8 Premi per Kapita per Tahun Provinsi di Pulau Jawa (dalam juta) 32
Gambar 5.1 Korelasi Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Premi Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2025 37
Gambar 5.2 Korelasi PDRB ADHB dan Total Premi Asuransi Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2025 38
Gambar 5.3 Korelasi Investasi dan Premi Asuransi Umum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2025 40
Gambar 5.4 Korelasi Tingkat Pengagguran Terbuka dan Premi Asuransi Jiwa Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2025 41
Gambar 5.5 Pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan Premi, dan Rasio Klaim Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2025 43
Gambar 5.6 Korelasi Inflasi dan Rasio Klaim Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2025 44
Gambar 5.7 Korelasi Kredit Modal Kerja + Investasi dan Premi Asuransi Umum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2025 46
Gambar 5.8 Korelasi Kredit Konsumsi dan Premi Asuransi Jiwa Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2025 47

1. *EXECUTIVE SUMMARY*

Kondisi ekonomi regional di Pulau Jawa secara umum telah kembali stabil setelah tekanan pandemi. Pada 2025, seluruh provinsi mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 5%, dengan variasi struktur ekonomi yang cukup kuat antarwilayah. Jawa Barat dan Jawa Tengah memiliki basis manufaktur yang dominan, Jawa Timur memiliki kombinasi industri dan perdagangan yang kuat, Banten menonjol pada industri dan konstruksi, DKI Jakarta berorientasi pada jasa, bisnis, dan keuangan, sedangkan DI Yogyakarta memiliki karakter ekonomi yang lebih kuat pada sektor jasa, pendidikan, pariwisata, dan aktivitas perkotaan. Perbedaan struktur tersebut menghasilkan karakter kebutuhan perlindungan dan potensi pasar asuransi yang tidak seragam antarprovinsi.

Meskipun perekonomian seluruh provinsi tumbuh positif, perkembangan industri asuransi tidak selalu bergerak searah. Pada 2025, hanya DKI Jakarta, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta yang mencatat pertumbuhan premi positif, sedangkan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten mengalami kontraksi premi. Hasil analisis korelasi juga menunjukkan hubungan yang relatif lemah antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan premi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi regional belum secara otomatis dikonversikan menjadi peningkatan pemanfaatan produk asuransi. Perkembangan industri juga dipengaruhi oleh struktur ekonomi, distribusi pendapatan, formalitas pekerjaan, kepemilikan aset, akses terhadap jasa keuangan, serta karakteristik pasar masing-masing wilayah.

Kesenjangan kedalaman pasar asuransi antarprovinsi masih sangat besar. DKI Jakarta tetap menjadi pusat utama industri asuransi Pulau Jawa dengan penetrasi sebesar 4,09% pada 2025. Di luar Jakarta, tingkat penetrasi jauh lebih rendah, yaitu DI Yogyakarta 0,78%, Jawa Barat 0,72%, Banten 0,63%, Jawa Timur 0,51%, dan Jawa Tengah 0,39%. Selain itu, seluruh provinsi mengalami penurunan penetrasi dibandingkan 2023. Pola ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang pengembangan pasar yang besar, terutama di wilayah dengan basis ekonomi dan penduduk yang kuat tetapi pemanfaatan asuransinya masih terbatas.

Perbedaan karakter juga terlihat antara asuransi umum dan asuransi jiwa. Asuransi umum memiliki keterkaitan yang lebih kuat dengan kegiatan ekonomi produktif, investasi, aset, kredit usaha, industri, perdagangan, konstruksi, dan logistik. Oleh sebab itu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten memiliki potensi besar untuk pengembangan berbagai produk perlindungan aset dan kegiatan usaha. Sebaliknya, perkembangan asuransi jiwa lebih banyak berkaitan dengan kondisi sosial-ekonomi rumah tangga, termasuk tingkat pendapatan, formalitas pekerjaan, pola konsumsi, struktur usia, dan kemampuan melakukan perencanaan keuangan jangka panjang.

Dari sisi kesehatan portofolio, hasil kajian menunjukkan bahwa besarnya pasar tidak selalu identik dengan tingginya tekanan klaim. DKI Jakarta memiliki skala pasar paling besar tetapi menunjukkan tekanan klaim yang relatif lebih terkendali. Sebaliknya, beberapa wilayah dengan pasar lebih kecil mengalami tekanan yang lebih tinggi. Banten menjadi perhatian utama pada lini asuransi jiwa dengan rasio klaim gabungan sebesar 122,21% pada 2025, sementara DI Yogyakarta mencatat rasio klaim gabungan asuransi umum sebesar 113,76%. Pada lini syariah, volatilitas bahkan lebih tinggi, terutama di Jawa Timur dan Banten. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya menilai ekspansi pasar bersama-sama dengan kualitas underwriting, pricing, komposisi portofolio, serta kemampuan pengelolaan klaim.

Secara keseluruhan, hasil studi menunjukkan bahwa **Pulau Jawa bukan merupakan satu pasar asuransi yang homogen**. DKI Jakarta merupakan pasar yang telah relatif matang dan membutuhkan strategi pendalaman; Jawa Barat dan Jawa Timur memiliki pasar besar namun masih *underpenetrated*; Jawa Tengah memiliki potensi ekonomi besar tetapi kedalaman pasar paling rendah; DI Yogyakarta memiliki pasar relatif kecil tetapi intensitas penggunaan asuransi cukup tinggi; sedangkan Banten memiliki peluang kuat dari aktivitas industri tetapi menghadapi tekanan klaim yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, strategi pengembangan industri asuransi di Pulau Jawa perlu bergeser dari pendekatan yang seragam menuju pendekatan yang lebih regional, tersegmentasi, dan berbasis profil risiko.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, strategi pengembangan industri asuransi di Pulau Jawa perlu diarahkan pada ***regionalized insurance strategy***, yaitu strategi yang menyesuaikan produk, kanal distribusi, *pricing*, serta pengelolaan risiko dengan karakter ekonomi dan sosial masing-masing wilayah. DKI Jakarta dapat diarahkan pada pendalaman produk korporasi, kesehatan, pensiun, *cyber risk*, *embedded insurance*, dan perlindungan bernilai tinggi. Jawa Barat dan Jawa Tengah membutuhkan penguatan asuransi manufaktur, aset industri, logistik, serta perluasan pasar ritel. Jawa Timur dapat difokuskan pada kombinasi perlindungan industri, perdagangan, logistik, UMKM, dan rumah tangga, sementara Banten memiliki peluang utama pada asuransi industri, konstruksi, properti, dan proyek. DI Yogyakarta lebih relevan untuk produk jiwa, kesehatan, pendidikan, perjalanan, serta perlindungan usaha jasa.

Kedua, ekspansi pasar di luar DKI Jakarta perlu menjadi prioritas karena seluruh provinsi di luar Jakarta masih memiliki penetrasi di bawah 1%. Strategi tersebut sebaiknya tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai premi dari nasabah *existing*, tetapi juga memperluas jumlah masyarakat dan pelaku usaha yang memiliki perlindungan. Hal ini dapat dilakukan melalui produk yang lebih sederhana, premi yang fleksibel, mikroasuransi, perlindungan berbasis tempat kerja, bancassurance, serta distribusi digital dan berbasis ekosistem.

Ketiga, asuransi umum perlu semakin diintegrasikan dengan aktivitas ekonomi produktif. Kuatnya hubungan antara pembiayaan produktif dengan kebutuhan perlindungan menunjukkan peluang kolaborasi dengan bank, lembaga pembiayaan, kawasan industri, pengembang, perusahaan logistik, koperasi, dan pelaku rantai pasok. Asuransi dapat dikembangkan bukan sebagai produk tambahan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari ekosistem pembiayaan, investasi, dan pengelolaan risiko usaha.

Keempat, pengembangan asuransi jiwa perlu menggunakan segmentasi yang lebih berbasis karakteristik rumah tangga dan tenaga kerja. Produk bagi pekerja formal dapat diintegrasikan dengan *employee benefit*, kesehatan, proteksi pendapatan, dan pensiun, sedangkan wilayah dengan tingkat informalitas tinggi membutuhkan produk sederhana, kontribusi fleksibel, dan mekanisme pembayaran yang menyesuaikan pola pendapatan. Strategi ini penting terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memiliki basis pekerja produktif besar tetapi formalitas pekerjaan relatif terbatas.

Kelima, perusahaan asuransi perlu memperkuat ***risk-based underwriting*** **dan** ***portfolio management***, terutama pada wilayah dan lini bisnis dengan rasio klaim tinggi. Banten, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, serta lini syariah di beberapa provinsi memerlukan evaluasi terhadap *pricing*, seleksi risiko, struktur manfaat, *fraud management*, *reserving*, dan strategi reasuransi. Inflasi juga perlu diperhitungkan karena hasil analisis menunjukkan adanya hubungan positif antara inflasi regional dan rasio klaim, yang mengindikasikan potensi kenaikan biaya penggantian aset dan layanan yang ditanggung perusahaan asuransi.

Keenam, pengembangan produk perlu semakin mempertimbangkan risiko spesifik wilayah. Kawasan industri membutuhkan asuransi *property*, *engineering*, *marine cargo*, ataupun *liability*; wilayah perdagangan dan logistik membutuhkan perlindungan barang dan transportasi; wilayah dengan basis UMKM memerlukan mikroasuransi dan perlindungan usaha; sedangkan daerah yang memiliki kerentanan bencana membutuhkan proteksi properti, usaha, pertanian, dan produk risiko bencana. Dengan pendekatan tersebut, pertumbuhan premi dapat lebih terkait dengan kebutuhan riil wilayah.

Ketujuh, diperlukan revitalisasi strategi asuransi syariah. Penurunan premi syariah di berbagai provinsi menunjukkan bahwa besarnya populasi potensial belum otomatis menghasilkan permintaan. Pengembangan pasar perlu didukung oleh diferensiasi manfaat yang jelas, *pricing* kompetitif, kanal distribusi yang lebih efektif, integrasi dengan ekosistem keuangan syariah, serta penguatan kualitas underwriting untuk menghindari tekanan klaim yang berlebihan.

Terakhir, industri asuransi perlu mengembangkan **sistem monitoring regional** yang secara berkala mengintegrasikan indikator ekonomi dengan indikator bisnis asuransi. Pemantauan dapat mencakup pertumbuhan PDRB, struktur sektoral, investasi, kredit, inflasi, formalitas tenaga kerja, pengeluaran rumah tangga,

penetrasi, premi per kapita, pertumbuhan premi, rasio klaim, dan risiko bencana. Pendekatan tersebut memungkinkan strategi ekspansi, pengembangan produk, serta mitigasi risiko diperbarui sesuai perubahan kondisi daerah.

Dengan demikian, pengembangan industri asuransi di Pulau Jawa sebaiknya tidak semata-mata mengejar peningkatan volume premi, tetapi diarahkan pada **pertumbuhan pasar yang lebih dalam, inklusif, relevan dengan kebutuhan regional, serta sehat dari sisi risiko**. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat peran industri asuransi sebagai instrumen perlindungan rumah tangga dan dunia usaha sekaligus mendukung ketahanan ekonomi regional Pulau Jawa.

2. PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Industri asuransi merupakan bagian penting dari sistem keuangan karena menyediakan mekanisme pengalihan risiko bagi rumah tangga dan dunia usaha sekaligus berperan dalam mobilisasi dana jangka panjang untuk mendukung aktivitas ekonomi. Melalui mekanisme pembayaran premi dan pemberian manfaat ketika risiko terjadi, asuransi dapat membantu menjaga stabilitas keuangan rumah tangga, melindungi aset dan kegiatan usaha, serta mengurangi dampak ekonomi dari berbagai bentuk ketidakpastian. Dalam skala yang lebih luas, perkembangan industri asuransi juga memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi karena peningkatan pendapatan, investasi, kepemilikan aset, serta ekspansi kegiatan usaha dapat menciptakan kebutuhan yang semakin besar terhadap instrumen perlindungan risiko. Pradhan et al. (2017) menunjukkan bahwa hubungan antara perkembangan pasar asuransi dan pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara dua arah dan berbeda antarnegara, sehingga perkembangan industri asuransi perlu dipahami dalam konteks struktur dan karakteristik perekonomian tempat industri tersebut beroperasi. Temuan tersebut menegaskan bahwa perkembangan pasar asuransi tidak dapat dilepaskan dari dinamika ekonomi yang lebih luas (Pradhan et al., 2017).

Keterkaitan antara ekonomi dan industri asuransi juga terlihat di kawasan ASEAN. Safitri (2019), melalui analisis terhadap enam negara ASEAN termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa volume premi asuransi jiwa maupun non-jiwa berkaitan positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa penetrasi dan densitas asuransi jiwa memiliki hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi, sementara hubungan pada asuransi non-jiwa tidak selalu menunjukkan pola yang sama. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan asuransi jiwa dan asuransi umum dapat dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi yang berbeda dan karenanya perlu dianalisis secara terpisah (Safitri, 2019). Bukti dari negara lain juga memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara perkembangan asuransi, yang diukur melalui insurance density dan insurance penetration, dengan perkembangan ekonomi (Chopra & Saldi, 2019).

Namun demikian, perkembangan pasar asuransi tidak semata-mata ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi. Karakteristik sosial, demografi, ketenagakerjaan, tingkat pendidikan, urbanisasi, serta kondisi makroekonomi juga memengaruhi kapasitas dan kecenderungan masyarakat dalam menggunakan produk asuransi. Studi terhadap negara-negara emerging Asia dan OECD menunjukkan bahwa pendidikan dan struktur dependency ratio memiliki hubungan dengan permintaan asuransi, serta bahwa respons permintaan dapat berbeda berdasarkan karakteristik tingkat pendapatan suatu negara. Penelitian pada negara-negara BRICS

juga menunjukkan bahwa pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, suku bunga, dan kondisi sektor keuangan memiliki keterkaitan dengan permintaan asuransi jiwa, meskipun arah dan besarnya hubungan dapat berbeda berdasarkan indikator permintaan asuransi yang digunakan (Segodi & Sibindi, 2022). Temuan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan industri asuransi merupakan hasil interaksi antara kemampuan ekonomi masyarakat, karakteristik sosial-demografi, serta lingkungan ekonomi yang membentuk kebutuhan dan kemampuan untuk memperoleh perlindungan.

Dalam konteks Indonesia, hubungan tersebut menjadi semakin penting karena perkembangan ekonomi dan pasar keuangan berlangsung dalam kondisi regional yang sangat heterogen. Perbedaan tingkat pendapatan, struktur produksi, konsentrasi penduduk, urbanisasi, kualitas sumber daya manusia, tingkat formalitas tenaga kerja, investasi, akses terhadap layanan keuangan, serta karakteristik geografis berpotensi menghasilkan kapasitas dan kebutuhan perlindungan yang berbeda antarwilayah. Bukti mengenai heterogenitas tersebut juga terlihat pada sistem perlindungan kesehatan Indonesia. Pratiwi et al. (2021), misalnya, menemukan variasi yang besar dalam cakupan asuransi, akses terhadap layanan kesehatan, penggunaan layanan, dan pembayaran klaim antarwilayah di Indonesia. Studi tersebut menunjukkan bahwa karakteristik regional tetap menjadi faktor penting dalam memahami pemanfaatan perlindungan finansial dan layanan terkait di Indonesia (Pratiwi et al., 2021).

Pulau Jawa menjadi wilayah yang sangat strategis untuk mengkaji keterkaitan antara karakteristik ekonomi regional dan perkembangan industri asuransi. Pulau Jawa tidak hanya menjadi pusat populasi dan aktivitas ekonomi nasional, tetapi juga memiliki konsentrasi kegiatan industri, perdagangan, jasa, investasi, dan aktivitas sektor keuangan yang tinggi. Meskipun berada dalam satu kawasan ekonomi yang relatif terintegrasi, enam provinsi di Pulau Jawa memiliki struktur ekonomi yang berbeda. Jawa Barat dan Jawa Tengah memiliki basis industri pengolahan yang kuat, Jawa Timur memiliki struktur ekonomi yang relatif terdiversifikasi dengan peran industri dan perdagangan yang besar, Banten menunjukkan karakter industri dan konstruksi yang menonjol, sementara DKI Jakarta lebih terkonsentrasi pada aktivitas jasa, bisnis, dan keuangan. DI Yogyakarta memiliki karakteristik berbeda dengan dominasi kegiatan jasa dan capaian pembangunan manusia yang relatif tinggi. Perbedaan struktur tersebut menunjukkan bahwa basis permintaan dan jenis risiko yang membutuhkan perlindungan asuransi juga berpotensi berbeda antarprovinsi.

Dinamika ekonomi Pulau Jawa selama beberapa tahun terakhir semakin memperlihatkan pentingnya analisis tersebut. Setelah seluruh provinsi mengalami kontraksi pada tahun 2020, aktivitas ekonomi kembali mengalami pemulihan dan pada tahun 2025 seluruh provinsi mencatat pertumbuhan di atas 5 persen. Meskipun tingkat pertumbuhannya relatif berdekatan, kapasitas ekonomi antarprovinsi masih menunjukkan perbedaan yang lebar. Pada tahun 2025, PDRB per kapita DKI Jakarta

mencapai sekitar Rp212 juta, jauh lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur sekitar Rp48 juta, Banten Rp45 juta, Jawa Barat Rp36 juta, DI Yogyakarta Rp35 juta, dan Jawa Tengah sekitar Rp32 juta. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kesamaan tingkat pertumbuhan ekonomi tidak selalu mencerminkan kesamaan daya beli, akumulasi aset, maupun kapasitas masyarakat untuk mengalokasikan pendapatan pada instrumen perlindungan keuangan.

Perbedaan struktur ekonomi juga menghasilkan profil eksposur risiko yang tidak sama. Pada tahun 2025, industri pengolahan menyumbang sekitar 40,41% perekonomian Jawa Barat dan 33,39% Jawa Tengah, sementara kontribusinya di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta hanya sekitar 11%. Di sisi lain, aktivitas perdagangan memiliki peran yang relatif besar di Jawa Timur dan DKI Jakarta, sedangkan sektor konstruksi relatif menonjol di Banten dan Jawa Tengah. Karakteristik tersebut relevan bagi industri asuransi umum karena perkembangan industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, investasi, dan pembiayaan menciptakan aset serta kegiatan ekonomi yang memiliki eksposur terhadap risiko kerusakan, kecelakaan, kehilangan, maupun gangguan usaha. Dengan demikian, besarnya kebutuhan perlindungan tidak hanya ditentukan oleh ukuran ekonomi daerah, tetapi juga oleh jenis aktivitas ekonomi yang mendominasi masing-masing wilayah.

Pada sisi rumah tangga, kondisi sosial dan ketenagakerjaan juga memberikan konteks penting bagi perkembangan asuransi jiwa. Tingkat pendapatan, stabilitas pekerjaan, pendidikan, struktur usia, dan kondisi pembangunan manusia dapat memengaruhi kemampuan rumah tangga untuk melakukan perencanaan keuangan jangka panjang. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendapatan, pendidikan, life expectancy, dan kondisi ketenagakerjaan memiliki hubungan dengan permintaan asuransi jiwa, sementara pengangguran dapat menjadi faktor yang membatasi permintaan karena berkurangnya kapasitas rumah tangga dalam mengalokasikan pendapatan untuk produk perlindungan. Studi lain juga menempatkan GDP per kapita, pendidikan, urbanisasi, health expenditure, dan *life expectancy* sebagai faktor sosio-ekonomi dan demografi yang relevan terhadap konsumsi asuransi jiwa. Dalam konteks Indonesia sendiri, penelitian Rapi et al (2025) menemukan bahwa faktor ekonomi dan demografi, termasuk pendapatan, inflasi, pendidikan, dan harapan hidup, relevan dalam memahami perilaku pembelian asuransi jiwa.

Meskipun Pulau Jawa memiliki basis ekonomi yang besar, perkembangan industri asuransi antarprovinsi memperlihatkan ketimpangan yang cukup kuat. Pada tahun 2025, premi asuransi jiwa konvensional DKI Jakarta mencapai sekitar Rp68,43 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat sebesar Rp14,60 triliun dan Jawa Timur sebesar Rp13,09 triliun. Kesenjangan yang lebih besar terlihat pada asuransi umum konvensional, dengan premi DKI Jakarta mencapai Rp76,18 triliun, sedangkan Jawa Barat hanya sekitar Rp6,47 triliun, Jawa Timur Rp3,72 triliun, Jawa Tengah Rp2,08 triliun, Banten Rp1,83 triliun, dan DI Yogyakarta sekitar Rp0,40 triliun. Besarnya

disparitas tersebut menunjukkan adanya konsentrasi aktivitas industri asuransi pada wilayah tertentu dan sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perbedaan tersebut semata-mata merupakan konsekuensi dari besarnya skala ekonomi atau juga mencerminkan perbedaan karakteristik sosial-ekonomi dan struktur pasar di masing-masing wilayah.

Besarnya premi secara nominal juga belum dapat secara langsung digunakan sebagai indikator kedalaman pasar asuransi. Provinsi dengan PDRB, jumlah perusahaan, jumlah penduduk, dan konsentrasi aktivitas bisnis yang besar secara alamiah dapat memiliki premi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perkembangan industri asuransi perlu dibaca bersama indikator seperti penetrasi asuransi terhadap PDRB, premi per kapita atau insurance density, klaim, dan rasio klaim. Penggunaan berbagai indikator tersebut juga sejalan dengan literatur empiris yang menggunakan penetration dan density untuk menangkap tingkat perkembangan pasar asuransi secara lebih proporsional dibandingkan penggunaan volume premi semata (Safitri, 2019; Segodi & Sibindi, 2022). Dengan pendekatan tersebut, dapat diketahui apakah tingginya volume premi suatu wilayah memang mencerminkan pemanfaatan asuransi yang relatif tinggi atau terutama disebabkan oleh besarnya skala ekonomi wilayah tersebut.

Selain itu, perkembangan asuransi jiwa dan asuransi umum di Pulau Jawa menunjukkan pola yang tidak sepenuhnya sama. Kondisi tersebut konsisten dengan literatur yang menekankan bahwa faktor-faktor pembentuk permintaan kedua jenis asuransi dapat berbeda. Asuransi jiwa lebih erat berkaitan dengan pendapatan jangka panjang, kondisi demografi, stabilitas pekerjaan, dan perencanaan keuangan rumah tangga, sedangkan asuransi umum memiliki hubungan yang lebih dekat dengan aktivitas produksi, investasi, kepemilikan aset, konstruksi, perdagangan, kredit, serta risiko yang melekat pada kegiatan ekonomi. Karena itu, analisis perkembangan industri asuransi perlu membedakan kedua segmen tersebut agar karakter hubungan dengan perekonomian regional dapat diidentifikasi secara lebih tepat.

Literatur terdahulu juga menunjukkan bahwa hubungan ekonomi dan asuransi tidak selalu bersifat seragam maupun linear. Pradhan et al. (2017) menemukan variasi arah hubungan antara perkembangan asuransi dan pertumbuhan ekonomi antarnegara, sementara penelitian yang lebih baru menunjukkan bahwa hubungan pendapatan dan permintaan asuransi jiwa bahkan dapat bersifat non-monotonik. Artinya, peningkatan kapasitas ekonomi tidak secara otomatis diterjemahkan menjadi peningkatan penggunaan asuransi dengan proporsi yang sama. Faktor akses, pendidikan, struktur pekerjaan, karakteristik demografi, kondisi sektor keuangan, dan struktur ekonomi wilayah tetap dapat membentuk pola perkembangan yang berbeda. Hal tersebut memberikan dasar bagi pentingnya analisis pada level regional dibandingkan hanya menggunakan indikator nasional yang berpotensi menutupi heterogenitas antarwilayah.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang mengintegrasikan karakteristik perekonomian regional dengan perkembangan industri asuransi jiwa dan asuransi umum. Kajian ini memfokuskan analisis pada enam provinsi di Pulau Jawa, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten. Analisis mencakup indikator struktur dan pertumbuhan ekonomi, investasi, konsumsi, perbankan, kondisi sosial-demografi, ketenagakerjaan, karakteristik wilayah, serta kinerja industri asuransi yang direpresentasikan melalui premi, klaim, rasio klaim, penetrasi, dan premi per kapita. Selanjutnya, keterkaitan antara beberapa indikator utama—seperti pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan premi, PDRB dengan premi, investasi dengan asuransi umum, tingkat pengangguran dengan asuransi jiwa, inflasi dengan rasio klaim, serta kredit perbankan dengan premi asuransi—dianalisis untuk memperoleh gambaran mengenai pola hubungan yang muncul antarwilayah.

Dengan pendekatan deskriptif regional dan analisis keterkaitan tersebut, kajian ini tidak dimaksudkan untuk menetapkan hubungan kausal secara langsung, melainkan untuk mengidentifikasi pola, karakteristik, kesenjangan, serta keterkaitan awal antara kondisi ekonomi regional dan perkembangan industri asuransi di Pulau Jawa. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan dasar empiris untuk memahami karakter pasar asuransi pada masing-masing provinsi, mengidentifikasi peluang dan tantangan pengembangan asuransi jiwa maupun asuransi umum, serta mendukung penyusunan strategi pengembangan industri yang lebih sesuai dengan karakteristik dan potensi ekonomi masing-masing wilayah.

2.2 Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Menyusun kajian komprehensif mengenai kondisi dan driver ekonomi regional serta keterkaitannya dengan kinerja industri asuransi jiwa dan non-jiwa.

b) Tujuan

1. Mengidentifikasi struktur dan faktor penggerak utama ekonomi regional.
2. Mengidentifikasi pola konsumsi masyarakat dan pola aktivitas bisnis regional.
3. Menganalisis hubungan indikator makroekonomi daerah dengan premi dan klaim asuransi jiwa dan non-jiwa.
4. Mengidentifikasi potensi lini bisnis asuransi yang dapat berkembang pada daerah yang dianalisa.
5. Mengidentifikasi perbedaan pola keterkaitan antar wilayah berdasarkan struktur ekonomi dan sosial.

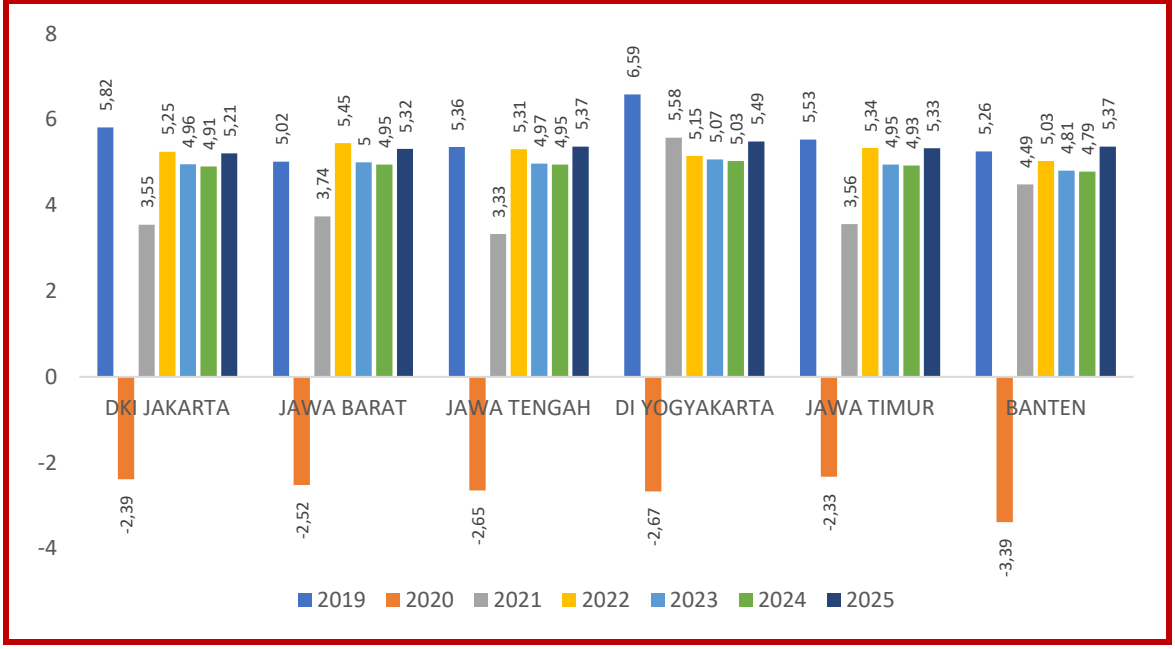
3. REGIONAL ECONOMIC LANDSCAPE

3.1 Analisis Struktur Ekonomi Regional

3.1.1 Pertumbuhan PDRB Riil

Pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa menunjukkan proses pemulihan yang relatif kuat setelah mengalami kontraksi pada 2020. Seluruh provinsi mengalami kontraksi pada tahun tersebut, dengan Banten mencatat penurunan terdalam sebesar 3,39%, diikuti Jawa Tengah sebesar 2,65% dan DI Yogyakarta sebesar 2,67%. Memasuki periode pemulihan, aktivitas ekonomi kembali meningkat pada 2021 dan semakin menguat pada 2022, sebelum pertumbuhan kemudian bergerak lebih stabil pada kisaran 5% selama 2023–2025.

Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Jawa (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa basis ekonomi Pulau Jawa memiliki kapasitas pemulihan yang relatif kuat, meskipun kecepatan pemulihan antarprovinsi tidak sepenuhnya sama. DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan pertumbuhan paling tinggi pada 2025, yaitu 5,49%, sedangkan DKI Jakarta mencatat pertumbuhan sebesar 5,21%. Sementara itu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten masing-masing tumbuh pada kisaran 5,32–5,37%. Rentang pertumbuhan yang relatif sempit tersebut mengindikasikan bahwa pada 2025 aktivitas ekonomi di Pulau Jawa telah berada dalam fase ekspansi yang cukup merata.

Dari perspektif struktur ekonomi regional, kondisi tersebut memberikan fondasi yang positif bagi perkembangan aktivitas usaha dan permintaan terhadap layanan proteksi. Pertumbuhan ekonomi yang konsisten mencerminkan meningkatnya aktivitas produksi, perdagangan, investasi, konsumsi, serta mobilitas masyarakat yang pada akhirnya menciptakan kebutuhan terhadap pengelolaan berbagai risiko ekonomi. Namun demikian, potensi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda antardaerah karena struktur ekonomi masing-masing provinsi tidak seragam. Provinsi dengan basis industri, perdagangan, jasa, maupun aktivitas ekonomi perkotaan yang lebih besar akan memiliki profil kebutuhan risiko yang berbeda, baik untuk perlindungan individu maupun aset dan kegiatan usaha.

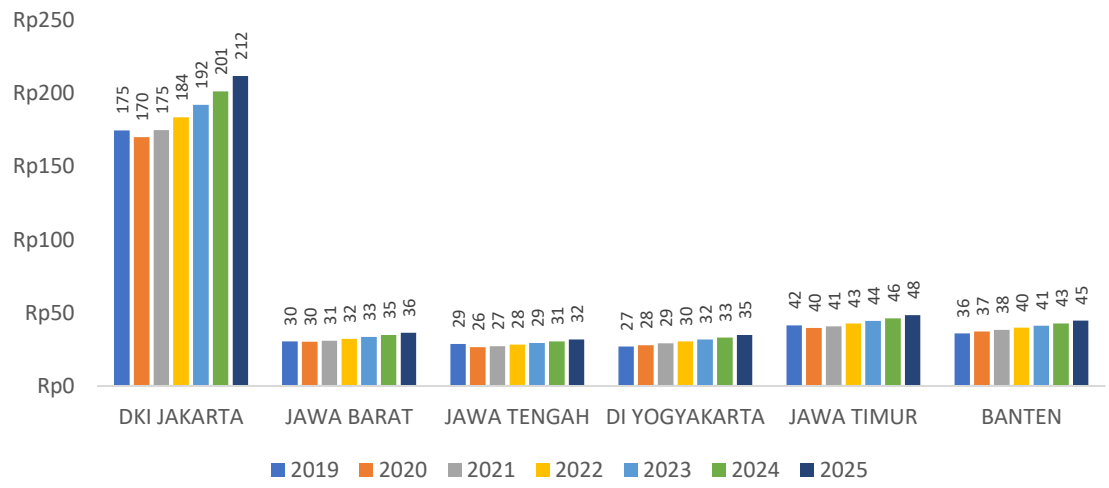
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa tidak hanya menunjukkan pemulihan dari tekanan ekonomi pada 2020, tetapi juga menjadi indikator awal mengenai luasnya ruang pengembangan pasar asuransi di tingkat regional. Pertumbuhan yang relatif stabil perlu dibaca bersama dengan indikator daya beli, kondisi ketenagakerjaan, kualitas pembangunan manusia, dan tingkat ketimpangan untuk melihat apakah peningkatan aktivitas ekonomi tersebut telah diikuti oleh peningkatan kapasitas masyarakat dalam memperoleh perlindungan asuransi.

3.1.2 PDRB per Kapita

Pendapatan per kapita menggambarkan rata-rata nilai pendapatan atau nilai tambah ekonomi yang dihasilkan untuk setiap penduduk dalam suatu wilayah selama satu tahun. Indikator ini dapat digunakan untuk melihat perbedaan tingkat kemakmuran ekonomi antarprovinsi sekaligus memberikan gambaran mengenai kapasitas ekonomi masyarakat di masing-masing wilayah.

Berdasarkan perkembangan selama periode 2019–2025, pendapatan per kapita antarprovinsi di Jawa menunjukkan kesenjangan yang cukup lebar. DKI Jakarta berada jauh di atas provinsi lainnya, dengan pendapatan per kapita meningkat dari sekitar Rp175 juta per kapita pada 2019 menjadi Rp212 juta pada 2025. Jarak yang cukup besar dengan provinsi lainnya menunjukkan tingginya konsentrasi aktivitas dan nilai tambah ekonomi di DKI Jakarta sebagai pusat kegiatan bisnis, jasa, perdagangan, dan pemerintahan.

Gambar 3.2 PDRB per Kapita Provinsi di Pulau Jawa (dalam juta)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

Di luar DKI Jakarta, Jawa Timur mencatat pendapatan per kapita tertinggi, yaitu meningkat dari Rp42 juta pada 2019 menjadi Rp48 juta per kapita pada 2025. Meskipun mengalami penurunan menjadi Rp40 juta pada 2020, pendapatan per kapita Jawa Timur kembali meningkat secara konsisten sejak 2021. Posisi berikutnya ditempati Banten, yang meningkat dari Rp36 juta menjadi Rp45 juta per kapita, serta Jawa Barat, yang naik dari Rp30 juta menjadi Rp36 juta per kapita selama periode yang sama. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya penguatan aktivitas ekonomi dan nilai tambah per penduduk setelah periode kontraksi pada 2020.

Sementara itu, Jawa Tengah memiliki pendapatan per kapita yang relatif lebih rendah. Pendapatan per kapita Jawa Tengah turun dari Rp29 juta pada 2019 menjadi Rp26 juta pada 2020, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai Rp32 juta pada 2025. DI Yogyakarta menunjukkan pola yang sedikit berbeda. Pendapatan per kapitanya justru meningkat secara konsisten dari Rp27 juta pada 2019 menjadi Rp35 juta pada 2025.

Secara keseluruhan, perkembangan pendapatan per kapita di Jawa menunjukkan pemulihan yang relatif konsisten setelah penurunan pada 2020. Hampir seluruh provinsi mengalami peningkatan hingga 2025, dengan Jawa Timur, Banten, dan Jawa Barat mencatat kenaikan yang cukup kuat. Namun demikian, kesenjangan antara DKI Jakarta dan provinsi lainnya masih sangat besar. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa besarnya aktivitas ekonomi di kawasan Jawa masih terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Dari perspektif industri asuransi, variasi pendapatan per kapita ini penting karena mencerminkan perbedaan kapasitas ekonomi dan potensi daya beli masyarakat dalam mengalokasikan pendapatan untuk produk perlindungan dan perencanaan keuangan.

3.1.3 Struktur Sektoral Ekonomi

Struktur ekonomi Jawa selama periode 2019–2025 memperlihatkan dominasi sektor industri pengolahan sebagai kontributor terbesar terhadap perekonomian regional.

Tabel 3.1 Kontribusi Sektoral 6 Provinsi di Pulau Jawa (%)

Kode	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8,12	8,65	8,30	8,20	8,12	7,96	8,14
B	Pertambangan dan Penggalian	1,52	1,41	1,52	1,53	1,35	1,28	1,20
C	Industri Pengolahan	27,04	26,93	27,16	26,91	26,72	26,62	26,42
D	Pengadaan listrik dan gas	0,54	0,50	0,52	0,50	0,47	0,40	0,39
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07
F	Konstruksi	10,45	10,08	10,43	10,27	10,09	10,17	10,15
G	Perdagangan besar dan eceran; Resparasi mobil dan sepeda motor	14,31	14,06	14,10	14,15	14,20	14,20	14,16
H	Transportasi dan pergudangan	5,38	4,17	4,12	5,22	5,87	6,06	6,07
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	4,93	4,48	4,53	4,76	4,92	5,08	5,25
J	Informasi dan komunikasi	5,13	6,07	6,26	6,02	6,00	5,97	5,97
K	Jasa keuangan dan asuransi	4,30	4,51	4,52	4,52	4,47	4,41	4,32
L	Real Estate	4,21	4,50	4,37	4,19	4,08	3,99	3,97
M,N	Jasa perusahaan	2,09	2,09	2,03	2,03	2,09	2,10	2,14
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	3,85	3,91	3,68	3,47	3,32	3,39	3,33
P	Jasa pendidikan	4,52	4,87	4,72	4,40	4,32	4,34	4,37
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,30	1,54	1,57	1,53	1,55	1,57	1,58
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,24	2,15	2,13	2,25	2,37	2,39	2,50
	TOTAL	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

Sektor industri pengolahan menyumbang sekitar 27% dari total aktivitas ekonomi sepanjang periode pengamatan, meskipun kontribusinya secara perlahan menurun dari 27,04% pada 2019 menjadi 26,42% pada 2025. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Jawa masih sangat ditopang oleh kapasitas produksi dan aktivitas manufaktur.

Selain industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor menjadi salah satu sektor dengan kontribusi terbesar, yaitu sekitar 14,16% pada 2025. Kontribusinya relatif stabil selama periode pengamatan, berada pada kisaran 14%. Kondisi serupa terlihat pada sektor konstruksi, yang menyumbang sekitar 10,15% pada 2025, serta menunjukkan pola yang relatif stabil sejak 2019. Struktur tersebut mencerminkan kuatnya keterkaitan antara aktivitas produksi, pembangunan fisik, perdagangan, dan permintaan domestik dalam perekonomian Jawa.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi sekitar 8,14% pada 2025. Sektor ini sempat meningkat hingga 8,65% pada 2020, kemudian kontribusinya cenderung menurun dan kembali meningkat tipis pada 2025. Meskipun bukan merupakan sektor dominan, keberadaannya tetap penting dalam struktur ekonomi Jawa, terutama dalam menyediakan bahan baku dan menopang aktivitas ekonomi di wilayah yang memiliki basis pertanian lebih kuat.

Sementara itu, beberapa sektor jasa menunjukkan perkembangan yang lebih menarik. Penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami penurunan cukup dalam dari 5,38% pada 2019 menjadi 4,12% pada 2021, sebelum kembali meningkat hingga 6,07% pada 2025. Pola tersebut menggambarkan tekanan yang terjadi pada aktivitas jasa selama periode pandemi dan pemulihan yang cukup kuat setelah mobilitas dan aktivitas ekonomi kembali meningkat. Informasi dan komunikasi juga memperlihatkan kecenderungan peningkatan, dari 4,93% pada 2019 menjadi 5,25% pada 2025, yang menunjukkan semakin pentingnya aktivitas berbasis digital dalam perekonomian regional.

Berbeda dengan kedua sektor tersebut, jasa keuangan dan asuransi mengalami peningkatan kontribusi pada awal periode, dari 5,13% pada 2019 menjadi 6,26% pada 2021, kemudian sedikit menurun dan relatif stabil pada 5,97% pada 2025. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sektor keuangan dan asuransi tetap memiliki posisi yang cukup penting dalam menopang aktivitas ekonomi Jawa. Stabilnya kontribusi setelah 2021 juga menunjukkan bahwa peran sektor tersebut telah relatif terkonsolidasi dalam struktur ekonomi regional.

Di sisi lain, beberapa sektor jasa memiliki kontribusi yang lebih kecil dan cenderung menurun. Real estate turun dari 4,30% pada 2019 menjadi 4,32% pada 2025 setelah sempat berada di atas 4,5% pada 2020–2022. Sementara itu, sektor jasa perusahaan menunjukkan penurunan dari 4,21% menjadi 3,97% selama periode pengamatan. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan struktur

ekonomi Jawa tidak terjadi secara seragam di seluruh sektor, melainkan terdapat pergeseran relatif di antara sektor-sektor pembentuk perekonomian.

Secara keseluruhan, struktur sektoral Jawa menunjukkan karakter ekonomi yang berbasis industri sekaligus semakin ditopang oleh aktivitas perdagangan dan jasa. Industri pengolahan tetap menjadi fondasi utama, sementara perdagangan, konstruksi, transportasi, akomodasi, informasi-komunikasi, serta jasa keuangan membentuk kelompok sektor penting berikutnya. Perkembangan sektor akomodasi dan makan minum serta informasi dan komunikasi juga mengindikasikan adanya penguatan aktivitas jasa setelah pandemi, sementara relatif stabilnya perdagangan dan konstruksi menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi domestik tetap menjadi salah satu penopang utama kawasan.

Dari perspektif industri asuransi, struktur tersebut menciptakan basis permintaan yang cukup beragam. Dominasi industri pengolahan dan konstruksi berkaitan dengan kebutuhan perlindungan aset dan aktivitas usaha, sedangkan perdagangan, transportasi, akomodasi, serta jasa keuangan membuka ruang bagi berkembangnya kebutuhan asuransi baik untuk kegiatan bisnis maupun individu. Dengan demikian, karakter sektoral Jawa tidak hanya menggambarkan sumber penciptaan nilai tambah regional, tetapi juga memberikan gambaran mengenai jenis aktivitas ekonomi yang berpotensi membentuk permintaan terhadap produk asuransi.

3.2 Analisis Sosial dan Demografi

Struktur umur merupakan salah satu aspek penting dalam menggambarkan karakteristik demografi provinsi di Pulau Jawa. Berdasarkan distribusi penduduk menurut kelompok usia tahun 2025, seluruh provinsi menunjukkan pola yang relatif serupa, yaitu jumlah penduduk yang cenderung terkonsentrasi pada kelompok usia produktif, terutama kelompok usia 20–59 tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Pulau Jawa berada pada kelompok usia yang secara demografis memiliki potensi untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi.

Gambar 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

Di antara provinsi-provinsi tersebut, Jawa Barat memiliki jumlah penduduk pada kelompok usia produktif yang paling besar secara absolut, sejalan dengan posisinya sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Pulau Jawa. Jawa Timur dan Jawa Tengah juga memiliki jumlah penduduk usia produktif yang besar,

sedangkan DKI Jakarta, Banten, dan DI Yogyakarta memiliki jumlah absolut yang lebih kecil sesuai dengan ukuran populasi masing-masing. Dengan demikian, besarnya potensi penduduk usia produktif antarprovinsi terutama berkaitan dengan perbedaan jumlah penduduk secara keseluruhan.

Sementara itu, kelompok usia muda (0–19 tahun) juga masih memiliki jumlah penduduk yang cukup besar di seluruh provinsi. Keberadaan kelompok usia tersebut menunjukkan adanya basis penduduk yang dalam beberapa tahun mendatang akan memasuki kelompok usia produktif. Namun, besarnya kelompok usia muda juga menunjukkan pentingnya penyediaan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan kualitas sumber daya manusia agar potensi demografi tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap produktivitas ekonomi di masa mendatang.

Pada kelompok usia yang lebih tua, jumlah penduduk secara umum menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan kelompok usia produktif. Meskipun demikian, keberadaan penduduk pada kelompok usia 60 tahun ke atas di seluruh provinsi menunjukkan bahwa aspek penuaan penduduk mulai menjadi bagian penting dalam dinamika demografi Pulau Jawa. Perubahan struktur umur tersebut berpotensi memengaruhi kebutuhan terhadap layanan kesehatan, jaminan sosial, perlindungan pendapatan, serta berbagai bentuk perlindungan risiko pada masa mendatang.

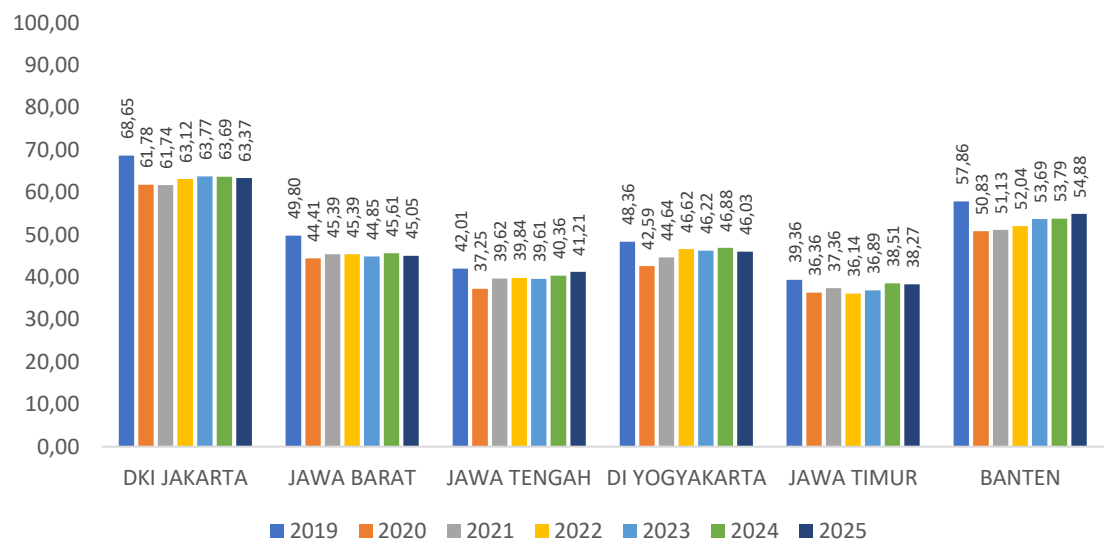
Secara keseluruhan, struktur umur penduduk di enam provinsi menunjukkan bahwa Pulau Jawa masih memiliki basis penduduk usia produktif yang besar, sementara kelompok usia muda tetap menyediakan potensi tambahan tenaga kerja pada masa depan. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi pembangunan ekonomi melalui pemanfaatan bonus demografi, tetapi manfaatnya sangat bergantung pada kemampuan masing-masing daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan produktivitas penduduk.

Dalam konteks industri asuransi, struktur demografi tersebut juga menunjukkan potensi pasar yang berbeda menurut kelompok usia dan karakteristik penduduk masing-masing provinsi. Besarnya kelompok usia produktif dapat memperluas kebutuhan terhadap perlindungan pendapatan, kesehatan, kendaraan, aset, dan aktivitas ekonomi. Sementara itu, keberadaan kelompok usia lanjut yang semakin penting secara demografis dapat meningkatkan kebutuhan terhadap perlindungan kesehatan dan risiko hari tua. Dengan demikian, struktur umur penduduk di Pulau Jawa tidak hanya mencerminkan kondisi sosial-demografi, tetapi juga menjadi salah satu faktor yang membentuk potensi kebutuhan terhadap produk asuransi di masing-masing provinsi.

3.3 Analisis Ketenagakerjaan

Persentase tenaga kerja formal menunjukkan proporsi tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja atau kegiatan usaha yang relatif lebih terstruktur dan memiliki karakteristik pekerjaan yang lebih formal. Data 2019–2025 memperlihatkan bahwa DKI Jakarta dan Banten memiliki proporsi tenaga kerja formal paling tinggi, sedangkan Jawa Tengah dan Jawa Timur relatif lebih rendah. Pada 2025, persentase tenaga kerja formal mencapai 63,37% di DKI Jakarta dan 54,88% di Banten, sementara Jawa Barat sebesar 45,05%, DI Yogyakarta 46,03%, Jawa Tengah 41,21%, dan Jawa Timur 38,27%.

Gambar 3.4 Persentase Tenaga Kerja Formal Provinsi di Pulau Jawa (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

Pola tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dengan struktur ekonomi regional. DKI Jakarta memiliki konsentrasi kegiatan perdagangan, jasa keuangan, informasi dan komunikasi, serta jasa perusahaan yang relatif besar dan cenderung menghasilkan lebih banyak pekerjaan formal. Banten juga memiliki basis industri pengolahan yang kuat serta aktivitas perdagangan dan jasa yang mendukung penyerapan tenaga kerja formal. Sebaliknya, provinsi seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki porsi kegiatan ekonomi yang lebih luas pada sektor-sektor yang juga melibatkan tenaga kerja informal dalam jumlah besar, sehingga proporsi tenaga kerja formalnya relatif lebih rendah.

Dari sisi perkembangan, seluruh provinsi mengalami penurunan persentase tenaga kerja formal pada 2020 dibandingkan 2019. Penurunan paling besar terlihat di DKI Jakarta, dari 68,65% menjadi 61,78%, serta Banten dari 57,86% menjadi 50,83%. Setelah 2020, sebagian besar provinsi menunjukkan pemulihan, meskipun belum seluruhnya kembali ke tingkat 2019. Pada 2025, Banten menjadi salah satu provinsi

dengan peningkatan paling kuat dibandingkan kondisi awal, mencapai 54,88%. Secara sosial-ekonomi, kondisi ini menunjukkan bahwa pemulihan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya identik dengan peningkatan kualitas dan formalitas pekerjaan, sehingga penguatan sektor-sektor produktif dan penciptaan lapangan kerja formal tetap menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pasar kerja di Pulau Jawa.

3.4 Analisis Karakteristik Wilayah

Risiko bencana merupakan salah satu aspek penting dalam melihat karakteristik wilayah karena dapat memengaruhi keamanan masyarakat, keberlanjutan aktivitas ekonomi, serta kebutuhan perlindungan terhadap berbagai risiko. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Tahun 2025, seluruh provinsi di Pulau Jawa berada dalam kategori risiko sedang, dengan nilai indeks yang menunjukkan adanya variasi tingkat kerentanan antarwilayah.

Tabel 3.2 Indeks Risiko Bencana Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2025

No	Provinsi	Indeks Risiko Bencana	Keterangan
1	DKI JAKARTA	57,79	Sedang
2	JAWA BARAT	106,02	Sedang
3	JAWA TENGAH	92,37	Sedang
4	DI YOGYAKARTA	88,91	Sedang
5	JAWA TIMUR	108,36	Sedang
6	BANTEN	103,58	Sedang
	RATA-RATA	**92,83**	**Sedang**

Sumber: BNPB, 2026 (diolah)

Nilai indeks risiko bencana tertinggi tercatat di Jawa Timur sebesar 108,36, diikuti Jawa Barat sebesar 106,02 dan Banten sebesar 103,58. Sementara itu, Jawa Tengah memiliki indeks sebesar 92,37, DI Yogyakarta 88,91, dan DKI Jakarta mencatat nilai terendah sebesar 57,79. Secara keseluruhan, rata-rata indeks risiko bencana enam provinsi mencapai 92,83 dan masih berada dalam kategori sedang.

Perbedaan nilai tersebut menunjukkan bahwa meskipun seluruh provinsi berada pada kategori risiko yang sama, tingkat paparan dan kerentanan terhadap bencana tidak sepenuhnya seragam. Wilayah dengan indeks yang lebih tinggi memerlukan perhatian lebih besar dalam penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan kapasitas penanganan risiko bencana.

Dalam konteks pembangunan ekonomi dan layanan perlindungan, kondisi tersebut juga memiliki implikasi terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha dalam mengelola risiko. Tingkat risiko bencana yang relatif tinggi dapat meningkatkan kebutuhan terhadap perlindungan aset, properti, kesehatan, maupun aktivitas

ekonomi, sehingga menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan risiko di masing-masing wilayah.

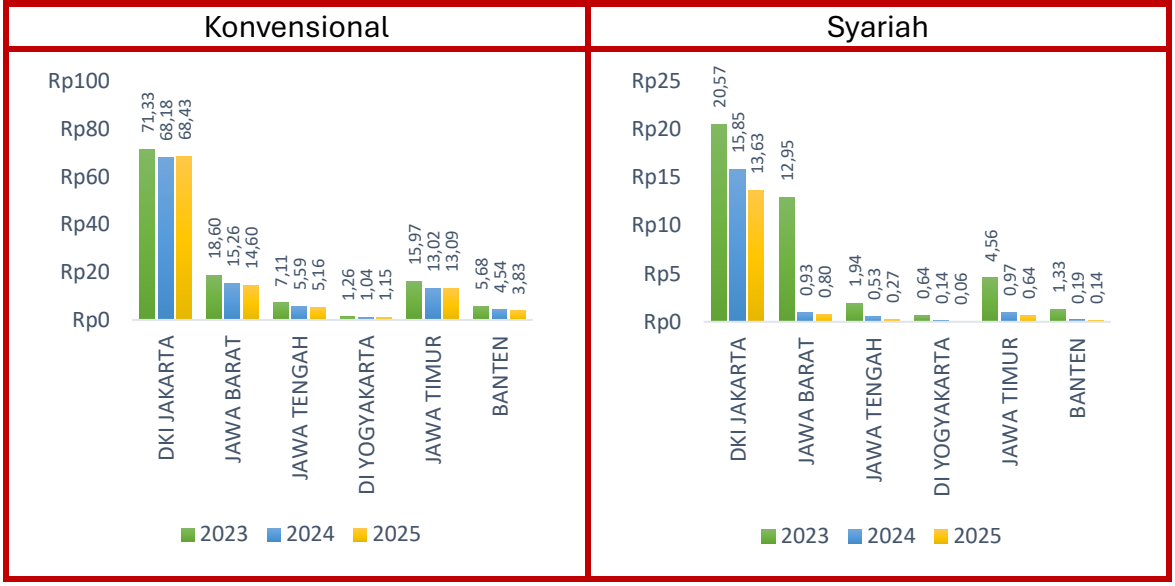
4. REGIONAL INSURANCE LANDSCAPE

Kinerja industri asuransi di Pulau Jawa mencerminkan tingkat perkembangan ekosistem keuangan serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya manajemen risiko. Sebagai instrumen perlindungan finansial, asuransi memiliki peran ganda, yaitu memberikan jaring pengaman bagi rumah tangga dan pelaku usaha dalam menghadapi berbagai ketidakpastian, sekaligus berfungsi sebagai investor institusional yang menghimpun premi masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk mendukung aktivitas pembangunan dan perekonomian regional. Analisis kinerja industri asuransi menjadi penting dalam konteks Pulau Jawa yang memiliki kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi, sekaligus menghadapi berbagai risiko bencana dan kerentanan ekonomi yang berbeda antarwilayah.

4.1 Premi Asuransi Jiwa dan Asuransi Umum per Wilayah

Kapasitas pasar asuransi di Pulau Jawa menunjukkan konsentrasi yang sangat kuat pada beberapa wilayah utama, terutama DKI Jakarta, baik pada lini asuransi jiwa maupun asuransi umum. Kondisi tersebut mencerminkan besarnya konsentrasi aktivitas ekonomi, jasa keuangan, kepemilikan aset, serta basis nasabah di wilayah metropolitan. Pada saat yang sama, perbedaan skala antara produk konvensional dan syariah menunjukkan bahwa pasar asuransi di Pulau Jawa masih didominasi oleh skema konvensional, sementara asuransi syariah memiliki pangsa pasar yang jauh lebih kecil dan cenderung terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Analisis terhadap perkembangan premi berikut memberikan gambaran mengenai konsentrasi pasar dan tingkat pemanfaatan instrumen perlindungan finansial di masing-masing provinsi.

Gambar 4.1 Perkembangan Premi Asuransi Jiwa Provinsi di Pulau Jawa (dalam triliun)

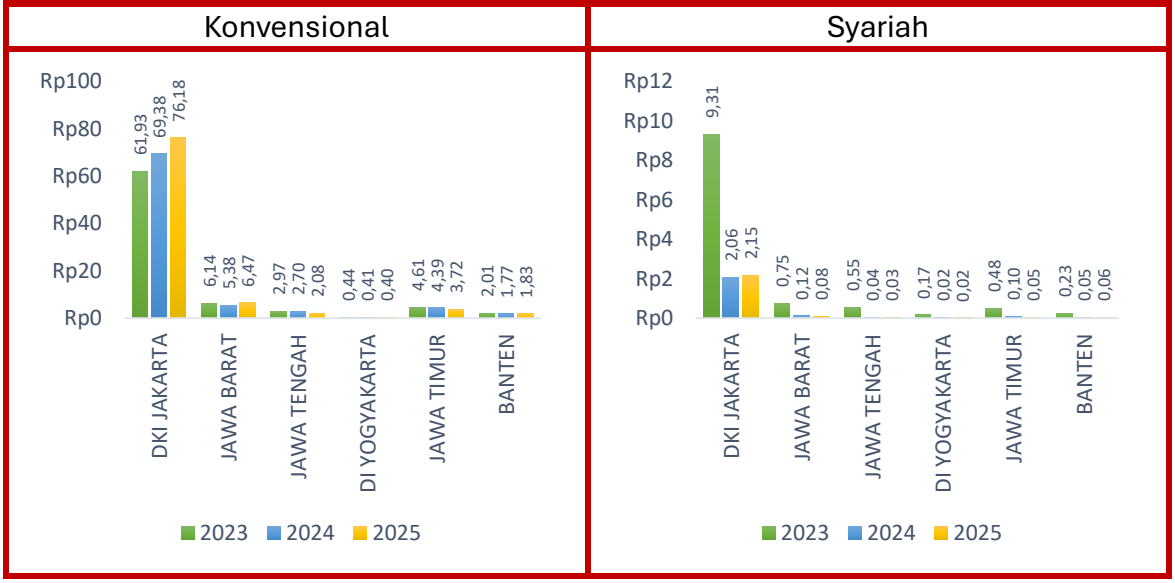


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2026 (diolah)

Gambar di atas menunjukkan bahwa pasar asuransi jiwa di Pulau Jawa masih sangat terkonsentrasi pada DKI Jakarta. Pada 2025, premi asuransi jiwa konvensional DKI Jakarta mencapai Rp68,43 triliun, atau sekitar 64% dari total premi jiwa konvensional enam provinsi. Jawa Barat dan Jawa Timur berada pada posisi berikutnya dengan masing-masing Rp14,60 triliun dan Rp13,09 triliun. Dengan demikian, sekitar 90% premi jiwa konvensional terkonsentrasi pada tiga provinsi tersebut, menunjukkan bahwa kapasitas pasar jiwa sangat terkait dengan pusat aktivitas ekonomi dan populasi perkotaan berskala besar.

Struktur yang lebih terkonsentrasi terlihat pada asuransi jiwa syariah. Pada 2025, premi DKI Jakarta mencapai Rp13,63 triliun, sementara Jawa Barat hanya Rp0,80 triliun dan Jawa Timur Rp0,64 triliun. Secara keseluruhan, DKI Jakarta menyumbang sekitar 88% total premi jiwa syariah enam provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar asuransi jiwa syariah di Pulau Jawa masih berada dalam struktur yang sangat tersentralisasi, dengan aktivitas pasar yang jauh lebih besar di pusat ekonomi utama dibandingkan provinsi lainnya. Di luar Jakarta, nilai premi syariah relatif kecil, meskipun keberadaan pasar tersebut tetap menunjukkan adanya ruang pengembangan lebih lanjut.

Gambar 4.2 Perkembangan Premi Asuransi Umum Provinsi di Pulau Jawa (dalam triliun)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2026 (diolah)

Pada asuransi umum, tingkat konsentrasi pasar bahkan lebih kuat. Gambar di atas menunjukkan bahwa premi asuransi umum konvensional DKI Jakarta mencapai Rp76,18 triliun pada 2025, sementara Jawa Barat berada pada Rp6,47 triliun dan Jawa Timur Rp3,72 triliun. DKI Jakarta sendiri menyumbang sekitar 84% total premi asuransi umum konvensional pada enam provinsi. Dominasi ini memperlihatkan bahwa kebutuhan perlindungan terhadap aset, kegiatan usaha, properti, kendaraan, dan aktivitas ekonomi lainnya sangat terkonsentrasi di pusat kegiatan ekonomi regional.

Kesenjangan yang lebih besar juga terlihat pada asuransi umum syariah. Premi DKI Jakarta sebesar Rp2,15 triliun pada 2025 mencakup sekitar 90% dari total premi asuransi umum syariah enam provinsi. Sementara itu, Jawa Barat dan Jawa Tengah masing-masing hanya mencatat Rp0,08 triliun dan Rp0,03 triliun. Skala pasar yang sangat kecil di luar Jakarta menunjukkan bahwa pemanfaatan asuransi umum syariah di Pulau Jawa masih bersifat niche market, dengan tingkat konsentrasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan lini konvensional.

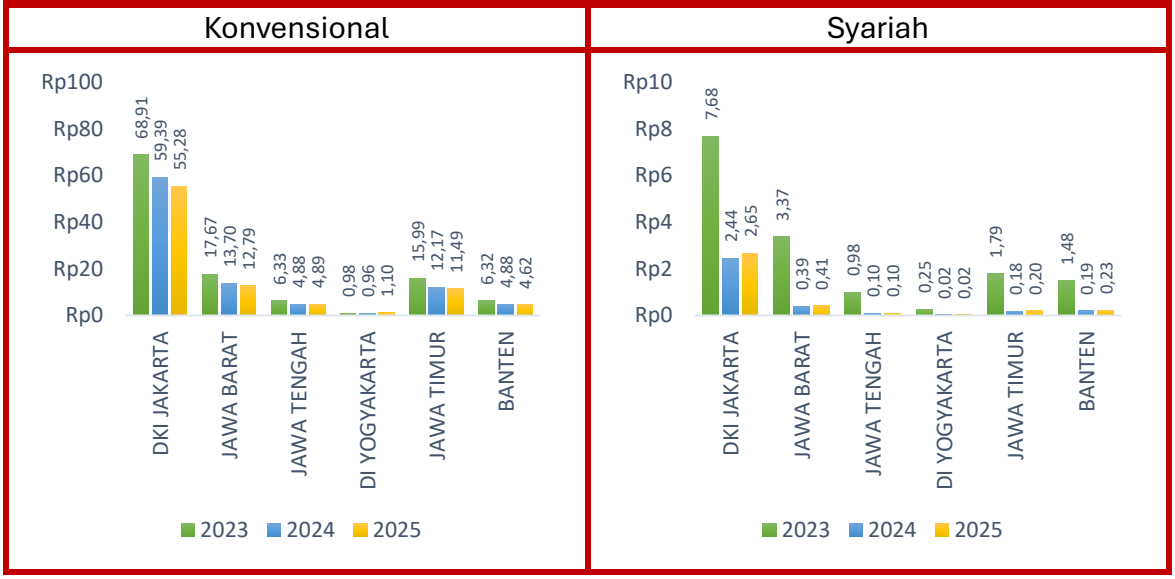
Secara keseluruhan, struktur premi tersebut memperlihatkan dua karakter utama pasar asuransi Pulau Jawa. Pertama, terdapat konsentrasi yang sangat kuat di DKI Jakarta sebagai pusat aktivitas ekonomi dan jasa keuangan regional. Kedua, terdapat kesenjangan yang besar antara pasar konvensional dan syariah, terutama di luar Jakarta. Pada sisi lain, Jawa Barat dan Jawa Timur memiliki basis pasar yang cukup besar pada lini konvensional, sehingga keduanya dapat dipandang sebagai pasar regional utama di luar DKI Jakarta. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan pasar asuransi di Pulau Jawa tidak hanya bergantung pada ekspansi di pusat ekonomi utama, tetapi juga pada kemampuan industri memperluas penetrasi ke provinsi

dengan basis ekonomi dan populasi besar namun nilai premi yang masih relatif rendah.

4.2 Klaim Asuransi Jiwa dan Asuransi Umum per Wilayah

Realisasi klaim merupakan wujud dari fungsi proteksi industri asuransi dalam memberikan perlindungan finansial kepada pemegang polis ketika risiko terjadi. Tingginya nilai klaim pada suatu wilayah tidak serta-merta menunjukkan kinerja industri yang kurang baik, karena pada saat yang sama klaim mencerminkan besarnya manfaat perlindungan yang direalisasikan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dalam konteks regional, pola klaim juga dapat memberikan gambaran mengenai skala pasar, intensitas risiko, serta dinamika pembayaran manfaat pada masing-masing wilayah.

Gambar 4.3 Perkembangan Klaim Asuransi Jiwa Provinsi di Pulau Jawa (dalam triliun)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2026 (diolah)

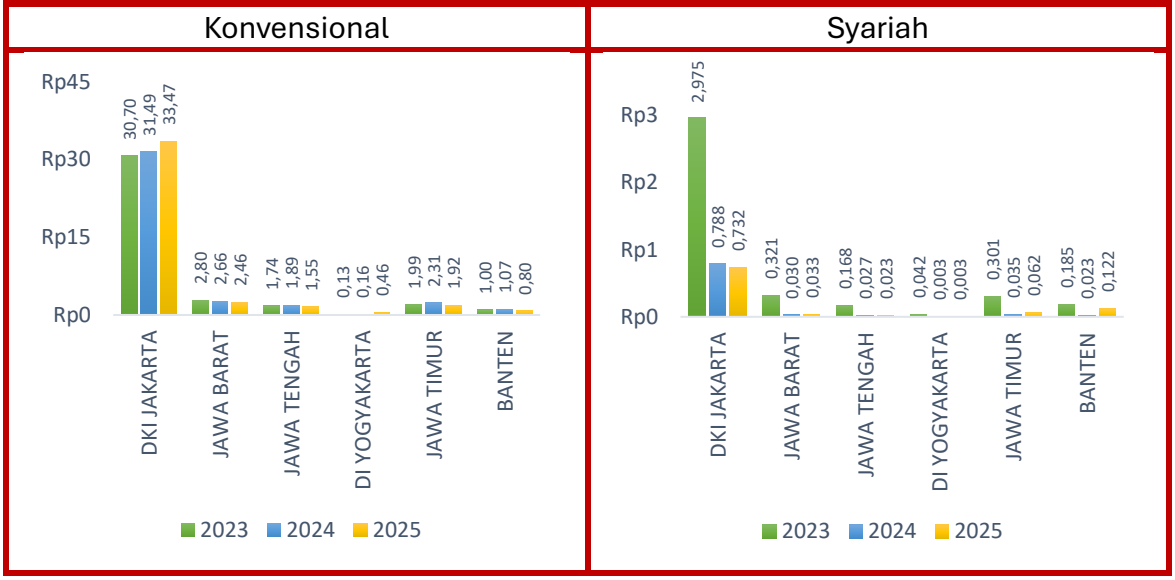
Penyajian data berikut membandingkan realisasi klaim asuransi jiwa dan asuransi umum, baik konvensional maupun syariah, di enam provinsi Pulau Jawa selama periode 2023–2025. Analisis ini digunakan untuk melihat konsentrasi pembayaran klaim, perbedaan karakter antara lini jiwa dan non-jiwa, serta perubahan beban klaim yang terjadi pada masing-masing wilayah.

Realisasi klaim asuransi jiwa konvensional menunjukkan konsentrasi yang cukup kuat di DKI Jakarta. Pada 2025, klaim jiwa konvensional DKI Jakarta mencapai Rp55,28 triliun, jauh di atas Jawa Barat sebesar Rp12,79 triliun dan Jawa Timur sebesar Rp11,49 triliun. Secara keseluruhan, ketiga provinsi tersebut menyumbang lebih dari 88% total klaim jiwa konvensional enam provinsi pada 2025. Namun, secara temporal,

DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur menunjukkan penurunan klaim dibandingkan 2023, yang mengindikasikan adanya normalisasi pembayaran manfaat setelah nilai klaim yang lebih tinggi pada awal periode pengamatan. Sementara itu, DI Yogyakarta justru mencatat peningkatan klaim dari Rp0,96 triliun pada 2024 menjadi Rp1,10 triliun pada 2025.

Pada lini asuransi jiwa syariah, pola konsentrasi juga terlihat, meskipun dengan skala nominal yang jauh lebih kecil. DKI Jakarta mencatat klaim sebesar Rp2,65 triliun pada 2025, atau sekitar tiga perempat dari total klaim jiwa syariah enam provinsi. Berbeda dengan lini konvensional, klaim syariah di sebagian besar provinsi mulai menunjukkan sedikit peningkatan pada 2025, seperti Jawa Barat dari Rp0,39 triliun menjadi Rp0,41 triliun, Jawa Timur dari Rp0,18 triliun menjadi Rp0,20 triliun, dan Banten dari Rp0,19 triliun menjadi Rp0,23 triliun. Meskipun demikian, seluruh wilayah masih mencatat nilai klaim yang jauh lebih rendah dibandingkan 2023, sehingga secara umum terdapat penurunan signifikan pada pembayaran klaim syariah selama periode pengamatan.

Gambar 4.4 Perkembangan Klaim Asuransi Umum Provinsi di Pulau Jawa (dalam triliun)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2026 (diolah)

Pada asuransi umum konvensional, konsentrasi klaim bahkan lebih kuat dibandingkan asuransi jiwa. DKI Jakarta mencatat klaim sebesar Rp33,47 triliun pada 2025, sementara Jawa Barat dan Jawa Timur masing-masing sebesar Rp2,46 triliun dan Rp1,92 triliun. Ketiga wilayah tersebut menyumbang lebih dari 92% total klaim asuransi umum konvensional enam provinsi pada 2025. DKI Jakarta juga menunjukkan peningkatan klaim secara konsisten dari Rp30,70 triliun pada 2023 menjadi Rp33,47 triliun pada 2025. Sebaliknya, sebagian besar provinsi lainnya mengalami penurunan

klaim, meskipun DI Yogyakarta menunjukkan peningkatan yang cukup tajam dari Rp0,16 triliun pada 2024 menjadi Rp0,46 triliun pada 2025.

Sementara itu, klaim asuransi umum syariah memiliki skala pasar yang jauh lebih kecil dan sangat terkonsentrasi di DKI Jakarta. Pada 2025, DKI Jakarta mencatat klaim sebesar Rp0,732 triliun, sedangkan provinsi lainnya berada pada kisaran Rp0,003–Rp0,122 triliun. Menariknya, Banten menunjukkan peningkatan paling signifikan, dari hanya Rp0,023 triliun pada 2024 menjadi Rp0,122 triliun pada 2025, disusul Jawa Timur yang meningkat menjadi Rp0,062 triliun. Sebaliknya, klaim di DKI Jakarta justru menurun dari Rp0,788 triliun menjadi Rp0,732 triliun.

Secara keseluruhan, struktur klaim memperlihatkan bahwa risiko yang ditanggung industri asuransi di Pulau Jawa masih sangat terkonsentrasi pada pusat-pusat aktivitas ekonomi, terutama DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Konsentrasi tersebut sejalan dengan besarnya skala pasar premi yang telah terlihat pada analisis sebelumnya. Namun, perubahan klaim antarprovinsi menunjukkan bahwa besarnya pasar tidak selalu diikuti oleh arah perkembangan klaim yang sama, sehingga evaluasi kinerja industri perlu dilanjutkan melalui analisis rasio klaim untuk melihat hubungan antara pembayaran klaim dan penerimaan premi secara lebih proporsional.

4.3 Rasio Klaim

Rasio klaim merupakan salah satu indikator penting untuk menilai hubungan antara beban pembayaran klaim dan penerimaan premi dalam industri asuransi. Indikator ini memberikan gambaran mengenai seberapa besar bagian premi yang terserap untuk pembayaran klaim, sehingga dapat digunakan untuk melihat tingkat keberlanjutan industri asuransi. Semakin tinggi rasio klaim, semakin besar porsi premi yang digunakan untuk memenuhi kewajiban klaim, sedangkan rasio yang lebih rendah menunjukkan beban klaim yang relatif lebih kecil terhadap premi. Dalam konteks regional, perbedaan rasio klaim antarprovinsi dapat mencerminkan variasi karakteristik pasar, profil risiko, dan perkembangan bisnis asuransi di masing-masing wilayah.

Gambar 4.5 Rasio Klaim Asuransi Jiwa Provinsi di Pulau Jawa (%)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2026 (diolah)

Pada Gambar di atas, rasio klaim asuransi jiwa konvensional di Pulau Jawa menunjukkan variasi yang cukup lebar antarprovinsi. Pada 2025, Banten mencatat rasio klaim tertinggi sebesar 120,73%, yang berarti nilai klaim lebih besar dibandingkan penerimaan premi pada tahun tersebut. Sebaliknya, DI Yogyakarta mencatat rasio klaim terendah sebesar 79,02%, sementara DKI Jakarta berada pada 80,11%. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur masing-masing mencatat rasio sebesar sekitar 85,97%, 87,80%, dan 94,83%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan klaim pada lini jiwa konvensional tidak sepenuhnya seragam dan relatif lebih tinggi di Banten dan Jawa Timur.

Pada lini asuransi jiwa syariah, perbedaan rasio klaim antarprovinsi terlihat lebih tajam. Banten kembali mencatat tingkat tertinggi, yaitu 162,73% pada 2025, setelah sebelumnya mencapai 110,87% pada 2023. Rasio yang berada jauh di atas 100% menunjukkan bahwa pembayaran klaim melampaui penerimaan premi pada tahun tersebut. Di sisi lain, DKI Jakarta mengalami penurunan rasio dari 37,34% pada 2023 menjadi 19,47% pada 2025, sedangkan Jawa Timur meningkat dari 39,20% menjadi 31,74% setelah sempat berada pada level yang lebih rendah pada 2024. Perbedaan ini memperlihatkan karakter pasar syariah yang lebih heterogen dibandingkan lini konvensional.

Jika lini konvensional dan syariah digabungkan, pola rasio klaim menunjukkan perbedaan yang lebih jelas antarprovinsi. Banten mencatat rasio klaim gabungan tertinggi sebesar 122,21% pada 2025, meningkat dari 111,27% pada 2023. Jawa Tengah juga mengalami peningkatan rasio dari 80,66% menjadi 91,84%, sementara DI Yogyakarta meningkat dari 64,93% menjadi 92,48%. Sebaliknya, DKI Jakarta mengalami penurunan dari 83,34% pada 2023 menjadi 70,59% pada 2025, sedangkan Jawa Timur relatif stabil di sekitar 85%. Pola tersebut menunjukkan bahwa perkembangan rasio klaim tidak selalu bergerak searah dengan besarnya pasar premi.

Secara keseluruhan, Banten menjadi wilayah yang paling menonjol dari sisi tekanan klaim, khususnya pada lini syariah dan secara agregat. Sementara itu, DKI Jakarta menunjukkan perbaikan rasio klaim gabungan meskipun memiliki skala pasar asuransi terbesar di Pulau Jawa. Temuan ini menunjukkan bahwa ukuran pasar tidak secara otomatis menentukan tingkat tekanan klaim, sehingga penilaian kesehatan bisnis asuransi perlu mempertimbangkan komposisi premi, realisasi klaim, serta rasio klaim secara bersamaan. Ini juga menjadi dasar penting untuk melihat indikator berikutnya, terutama penetrasi asuransi terhadap PDRB, karena besarnya volume premi perlu dibaca dalam konteks kapasitas ekonomi masing-masing wilayah.

Selanjutnya, Rasio klaim asuransi umum di Pulau Jawa menunjukkan variasi yang cukup besar antarprovinsi dan antara skema konvensional maupun syariah. Pada lini konvensional, sebagian besar provinsi masih berada di bawah 100%, namun terdapat peningkatan yang sangat tajam di DI Yogyakarta pada 2025. Sementara itu, rasio klaim syariah menunjukkan volatilitas yang lebih tinggi, dengan beberapa wilayah mencatat rasio di atas 100% yang mengindikasikan pembayaran klaim lebih besar daripada penerimaan premi pada periode tersebut.

Gambar di bawah menunjukkan bahwa pada asuransi umum konvensional, DKI Jakarta mencatat rasio klaim sebesar 43,64% pada 2025, turun dari 47,26% pada 2023. Jawa Barat juga mengalami penurunan menjadi 38,04%, sedangkan Jawa Tengah meningkat menjadi 74,36%. Perubahan paling menonjol terjadi di DI Yogyakarta, di mana rasio klaim melonjak dari 28,82% pada 2023 menjadi 117,26% pada 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada 2025 nilai klaim di DI Yogyakarta telah melampaui penerimaan premi asuransi umum konvensional. Jawa

Timur relatif meningkat menjadi 49,68%, sedangkan Banten menurun menjadi 43,61%.

Gambar 4.6 Rasio Klaim Asuransi Umum Provinsi di Pulau Jawa (%)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2026 (diolah)

Pada lini asuransi umum syariah, variasi rasio klaim terlihat jauh lebih lebar. DKI Jakarta meningkat dari 31,93% pada 2023 menjadi 34,00% pada 2025, sementara Jawa Barat meningkat menjadi 40,72%. Jawa Tengah mencatat kenaikan cukup besar hingga 89,82% pada 2025. DI Yogyakarta mengalami kenaikan dari 21,53% menjadi 21,84%, meskipun masih berada pada tingkat yang relatif rendah. Sebaliknya, Jawa Timur mengalami lonjakan tajam dari 62,69% pada 2023 menjadi 113,96% pada 2025,

sedangkan Banten mencatat rasio tertinggi sebesar 205,98%, setelah sebelumnya berada pada 74,03% pada 2023.

Jika asuransi umum konvensional dan syariah digabungkan, sebagian besar provinsi masih berada pada rasio klaim di bawah 100%. DKI Jakarta tercatat relatif stabil dan menurun menjadi 43,66% pada 2025, sementara Jawa Barat turun menjadi 38,10%. Jawa Tengah justru mengalami peningkatan bertahap hingga 74,54%. Perubahan paling ekstrem terjadi di DI Yogyakarta, dengan rasio klaim gabungan meningkat dari 27,80% pada 2023 menjadi 113,76% pada 2025. Sebaliknya, Jawa Timur relatif stabil pada 52,55%, sedangkan Banten menurun menjadi 48,70% setelah mencapai 59,74% pada 2024.

Secara keseluruhan, profil rasio klaim menunjukkan bahwa tekanan klaim pada asuransi umum tidak seragam antarprovinsi. DI Yogyakarta dan Banten menjadi wilayah yang paling menonjol dari sisi volatilitas, terutama pada lini syariah dan perubahan rasio klaim secara agregat. Sementara itu, DKI Jakarta dan Jawa Barat menunjukkan rasio yang relatif lebih terkendali meskipun memiliki skala pasar premi yang jauh lebih besar. Temuan ini menegaskan bahwa besarnya pasar asuransi tidak secara langsung menentukan tingkat tekanan klaim, sehingga analisis kinerja industri perlu mempertimbangkan komposisi premi dan klaim serta karakteristik risiko masing-masing wilayah secara bersamaan.

4.4 Penetrasi Asuransi Terhadap PDRB

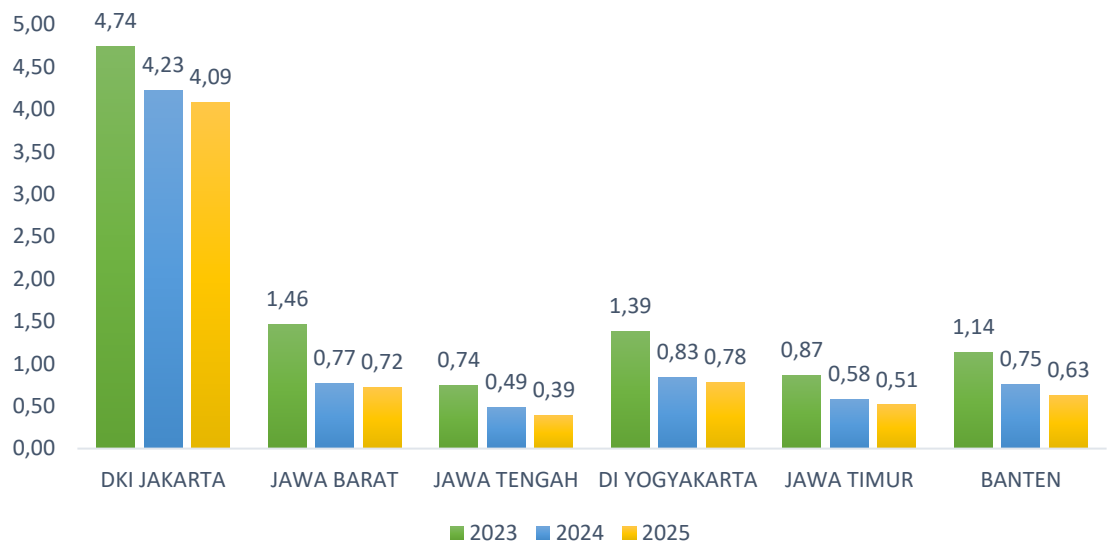
Penetrasi asuransi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat keterkaitan industri asuransi dengan aktivitas ekonomi riil suatu wilayah. Rasio ini memberikan gambaran mengenai seberapa besar aktivitas ekonomi regional yang telah diikuti oleh penggunaan instrumen perlindungan asuransi. Semakin tinggi tingkat penetrasi, semakin besar pula kontribusi premi asuransi relatif terhadap skala perekonomian daerah, sehingga indikator ini dapat digunakan untuk melihat tingkat integrasi dan perkembangan pasar asuransi antarwilayah.

Berdasarkan data 2023–2025, DKI Jakarta menunjukkan tingkat penetrasi asuransi tertinggi di Pulau Jawa, meskipun mengalami penurunan dari 4,74% pada 2023 menjadi 4,09% pada 2025. Tingkat penetrasi tersebut tetap jauh berada di atas provinsi lainnya, menunjukkan bahwa aktivitas asuransi di Jakarta memiliki keterkaitan yang relatif kuat dengan skala perekonomiannya. Kondisi ini sejalan dengan besarnya konsentrasi premi asuransi jiwa maupun umum yang telah terlihat pada analisis sebelumnya.

Di luar DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Jawa Barat memiliki tingkat penetrasi yang relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi Jawa lainnya. DI Yogyakarta mengalami penurunan dari 1,39% pada 2023 menjadi 0,78% pada 2025, sementara Jawa Barat turun dari 1,46% menjadi 0,72% pada periode yang sama. Banten juga menunjukkan

penurunan dari 1,14% menjadi 0,63%, sedangkan Jawa Timur turun dari 0,87% menjadi 0,51%. Pola tersebut menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi pada periode pengamatan belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan proporsi premi asuransi terhadap PDRB.

Gambar 4.7 Penetrasi Asuransi Terhadap PDRB Provinsi di Pulau Jawa (%)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2026 (diolah)

Sementara itu, Jawa Tengah mencatat tingkat penetrasi terendah di Pulau Jawa, yaitu turun dari 0,74% pada 2023 menjadi 0,39% pada 2025. Penurunan juga terjadi di seluruh provinsi lainnya, sehingga terdapat pola yang relatif konsisten berupa pelemahan penetrasi asuransi pada 2023–2025. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan nominal maupun skala ekonomi regional tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan penetrasi asuransi apabila perkembangan premi tidak tumbuh sejalan dengan PDRB.

Secara keseluruhan, terdapat kesenjangan penetrasi yang cukup besar antara DKI Jakarta dan provinsi lainnya. Pada 2025, tingkat penetrasi Jakarta mencapai lebih dari lima kali Jawa Barat dan Jawa Tengah. Temuan ini menunjukkan bahwa Pulau Jawa memiliki ruang pengembangan pasar yang cukup besar di luar pusat ekonomi utama, khususnya pada provinsi dengan basis ekonomi dan penduduk yang besar tetapi tingkat penetrasi asuransinya masih relatif rendah. Dengan demikian, penetrasi asuransi tidak hanya mencerminkan ukuran pasar, tetapi juga memberikan indikasi mengenai sejauh mana aktivitas ekonomi regional telah terintegrasi dengan mekanisme perlindungan risiko melalui industri asuransi.

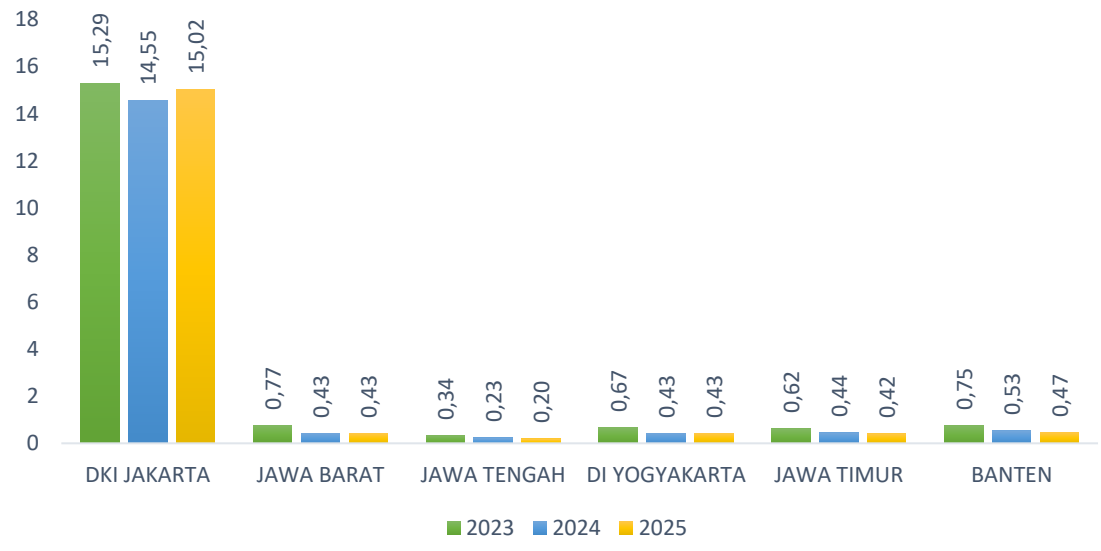
4.5 Premi per Kapita

Premi per kapita atau insurance density menggambarkan rata-rata nilai premi asuransi yang tercatat untuk setiap penduduk dalam suatu wilayah. Indikator ini memberikan perspektif yang berbeda dari penetrasi terhadap PDRB karena mengaitkan perkembangan pasar asuransi secara langsung dengan jumlah penduduk, sehingga dapat digunakan untuk melihat tingkat pemanfaatan layanan asuransi pada tingkat individu. Semakin tinggi premi per kapita, semakin besar nilai finansial yang terkait dengan penggunaan produk asuransi dalam suatu wilayah.

Berdasarkan Gambar di bawah, terdapat kesenjangan yang sangat besar dalam premi per kapita antarprovinsi di Pulau Jawa. DKI Jakarta memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya, dengan premi per kapita sebesar Rp15,29 juta pada 2023, menurun menjadi Rp14,55 juta pada 2024, kemudian kembali meningkat menjadi Rp15,02 juta pada 2025. Besarnya nilai tersebut menunjukkan bahwa skala pasar asuransi di Jakarta relatif tinggi ketika dibandingkan dengan jumlah penduduknya.

Di luar DKI Jakarta, nilai premi per kapita berada pada kisaran yang jauh lebih rendah. Jawa Barat mencatat Rp0,77 juta pada 2023 dan kemudian turun menjadi Rp0,43 juta pada 2024–2025. Jawa Tengah mengalami penurunan dari Rp0,34 juta pada 2023 menjadi Rp0,20 juta pada 2025. Sementara itu, DI Yogyakarta mencatat nilai sebesar Rp0,67 juta pada 2023 dan kemudian berada pada Rp0,43 juta pada 2024–2025. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan asuransi per penduduk di luar Jakarta masih relatif rendah dibandingkan pusat pasar asuransi regional.

Gambar 4.8 Premi per Kapita per Tahun Provinsi di Pulau Jawa (dalam juta)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2026 (diolah)

Jawa Timur menunjukkan premi per kapita sebesar Rp0,62 juta pada 2023, kemudian turun menjadi Rp0,44 juta pada 2024 dan Rp0,42 juta pada 2025. Banten mencatat pola yang serupa, dengan penurunan dari Rp0,75 juta pada 2023 menjadi Rp0,47 juta pada 2025. Kedua provinsi tersebut memiliki nilai premi per kapita yang relatif lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Tengah pada awal periode, tetapi mengalami penurunan pada dua tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, struktur premi per kapita menunjukkan dominasi yang sangat kuat DKI Jakarta dalam intensitas pemanfaatan asuransi pada tingkat penduduk. Sementara itu, lima provinsi lainnya memiliki tingkat premi per kapita yang jauh lebih rendah dan cenderung mengalami penurunan selama 2023–2025. Pola ini memperlihatkan bahwa besarnya populasi atau skala ekonomi suatu daerah belum secara otomatis menghasilkan tingkat penggunaan asuransi per penduduk yang tinggi. Dengan demikian, terdapat ruang yang cukup besar untuk memperluas keterjangkauan dan pemanfaatan produk asuransi di luar pusat pasar seperti DKI Jakarta.

4.6 Status Kesehatan

Status kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor yang relevan dalam membaca kondisi sosial dan risiko kesehatan di tingkat regional. Keberadaan keluhan kesehatan tidak hanya menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi memengaruhi produktivitas penduduk serta aktivitas ekonomi rumah tangga. Dalam konteks industri asuransi, kondisi kesehatan masyarakat menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena berkaitan dengan kebutuhan perlindungan kesehatan dan potensi pemanfaatan manfaat asuransi.

Tabel 4.1 Status Keluhan Kesehatan Penduduk Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2025 (%)

No	Provinsi	Memiliki Keluhan Kesehatan	Tidak Memiliki Keluhan Kesehatan
1	DKI JAKARTA	27,34	72,66
2	JAWA BARAT	32,54	67,46
3	JAWA TENGAH	34,22	65,78
4	DI YOGYAKARTA	33,64	66,36
5	JAWA TIMUR	32,10	67,90
6	BANTEN	28,95	71,05
	RATA-RATA	**31,47**	**68,54**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

Berdasarkan Tabel di atas, rata-rata penduduk yang memiliki keluhan kesehatan di enam provinsi Pulau Jawa pada 2025 mencapai 31,47%, sedangkan 68,54% tidak memiliki keluhan kesehatan. Jawa Tengah memiliki persentase

penduduk dengan keluhan kesehatan tertinggi, yaitu 34,22%, diikuti DI Yogyakarta sebesar 33,64% dan Jawa Barat sebesar 32,54%. Sementara itu, DKI Jakarta mencatat persentase terendah sebesar 27,34%, sedangkan Banten sebesar 28,95%. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kondisi kesehatan penduduk memiliki variasi antarwilayah, meskipun sebagian besar penduduk di seluruh provinsi tidak melaporkan keluhan kesehatan.

Tabel 4.2 Dampak Keluhan Kesehatan Penduduk Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2025 (%)

No	Provinsi	Keluhan Kesehatan Menyebabkan Terganggunya Pekerjaan, Sekolah, Lainnya	Keluhan Kesehatan Tidak Menyebabkan Terganggunya Pekerjaan, Sekolah, Lainnya
1	DKI JAKARTA	34,91	65,09
2	JAWA BARAT	48,60	51,40
3	JAWA TENGAH	45,44	54,56
4	DI YOGYAKARTA	42,35	57,65
5	JAWA TIMUR	42,72	57,28
6	BANTEN	44,77	55,23
	RATA-RATA	**43,13**	**56,87**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (diolah)

Jika dilihat dari dampak keluhan kesehatan terhadap aktivitas, rata-rata 43,13% penduduk yang mengalami keluhan kesehatan menyatakan bahwa keluhan tersebut menyebabkan terganggunya pekerjaan, sekolah, atau aktivitas lainnya, sementara 56,87% menyatakan tidak mengalami gangguan. Jawa Barat mencatat proporsi gangguan aktivitas tertinggi sebesar 48,60%, diikuti Jawa Tengah sebesar 45,44% dan Banten sebesar 44,77%. Sebaliknya, DKI Jakarta memiliki proporsi terendah, yaitu 34,91%, yang menunjukkan bahwa meskipun terdapat penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, proporsi yang mengalami gangguan aktivitas relatif lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya.

Kombinasi kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki proporsi penduduk dengan keluhan kesehatan yang relatif tinggi, sedangkan Jawa Barat menunjukkan dampak aktivitas yang paling besar ketika keluhan kesehatan terjadi. Di sisi lain, DKI Jakarta memiliki proporsi keluhan kesehatan terendah sekaligus persentase gangguan aktivitas terendah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan penduduk tidak hanya perlu dilihat dari prevalensi keluhan, tetapi juga dari sejauh mana kondisi tersebut memengaruhi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Dalam kaitannya dengan industri asuransi, kondisi tersebut memberikan gambaran mengenai heterogenitas kebutuhan perlindungan kesehatan antarprovinsi. Wilayah dengan proporsi keluhan dan gangguan aktivitas yang relatif tinggi memiliki

potensi kebutuhan proteksi yang lebih besar, meskipun pemanfaatan asuransi tetap dipengaruhi oleh kemampuan membayar premi, akses layanan keuangan, dan karakteristik pasar masing-masing daerah. Karena itu, indikator kesehatan ini melengkapi analisis kinerja asuransi sebelumnya dengan memberikan perspektif mengenai profil risiko kesehatan masyarakat sebagai salah satu dasar potensi kebutuhan perlindungan.

5. ANALISIS *LINKAGE* ANTARA KINERJA MAKROEKONOMI REGIONAL DENGAN KINERJA INDUSTRI ASURANSI

Hubungan antara kinerja makroekonomi dan industri asuransi di Pulau Jawa bersifat saling terkait dan memiliki dimensi yang multidimensional. Pertumbuhan ekonomi regional yang tercermin melalui peningkatan PDRB, pendapatan, dan aktivitas ekonomi dapat memperkuat kapasitas masyarakat maupun pelaku usaha dalam mengakses produk proteksi finansial. Di sisi lain, industri asuransi berperan dalam mendukung stabilitas ekonomi melalui mekanisme pengalihan risiko serta pengelolaan dana jangka panjang yang dapat menopang keberlanjutan aktivitas ekonomi. Analisis linkage ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara indikator makroekonomi dengan perkembangan industri asuransi di Pulau Jawa, serta melihat bagaimana perubahan kondisi ekonomi regional tercermin dalam dinamika premi, klaim, penetrasi, dan densitas asuransi di masing-masing provinsi.

5.1 Analisis PDRB Terhadap Premi

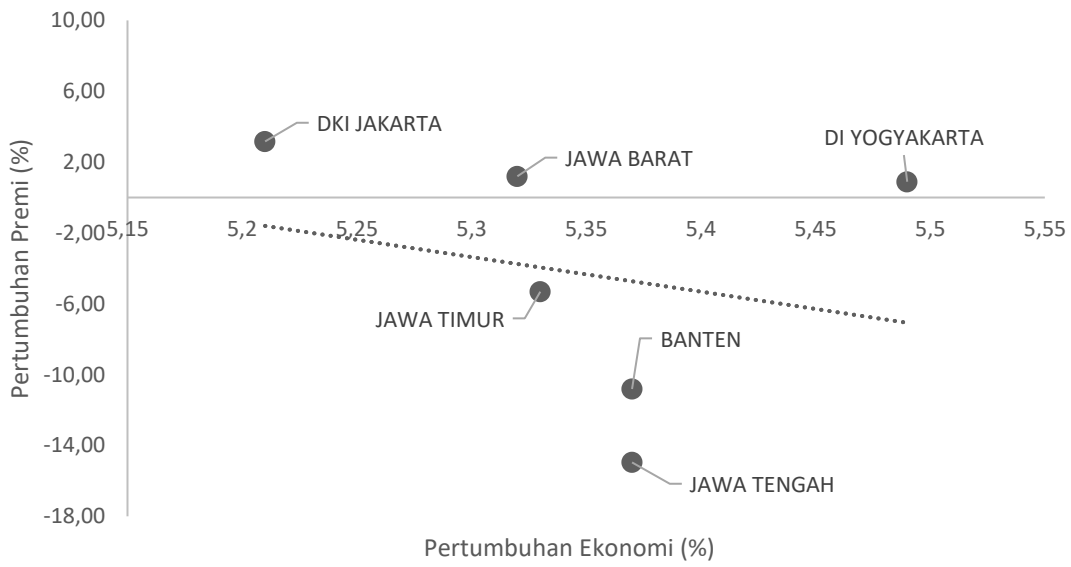
Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi seharusnya mendorong pertumbuhan premi melalui peningkatan pendapatan, aktivitas usaha, kepemilikan aset, dan kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan finansial. Namun, pola di Pulau Jawa pada 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan premi memiliki korelasi negatif, dengan hubungan yang relatif lemah. Artinya, provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi justru cenderung tidak selalu diikuti oleh pertumbuhan premi yang lebih tinggi.

Meskipun seluruh provinsi mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 5%, hanya DKI Jakarta, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta yang menunjukkan pertumbuhan premi positif. Sebaliknya, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur mengalami kontraksi premi meskipun perekonomiannya tetap tumbuh kuat. Pola ini menunjukkan bahwa ekspansi ekonomi regional belum secara otomatis diterjemahkan menjadi peningkatan permintaan terhadap produk asuransi dalam jangka pendek.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara aktivitas ekonomi dan perkembangan pasar asuransi bersifat heterogen antarwilayah. DKI Jakarta, misalnya, memperlihatkan pola yang lebih sejalan dengan hubungan teoritis, yaitu pertumbuhan ekonomi disertai peningkatan premi. Sementara itu, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur menunjukkan kondisi yang berbeda, di mana pertumbuhan ekonomi tetap positif tetapi premi justru mengalami penurunan. Hal ini

mengindikasikan bahwa pertumbuhan output regional belum sepenuhnya dikonversikan menjadi peningkatan kebutuhan atau pemanfaatan produk asuransi.

Gambar 5.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Premi Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 & Otoritas Jasa Keuangan, 2026 (diolah)

Secara ekonomi, kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh perbedaan struktur ekonomi, distribusi pendapatan, formalitas tenaga kerja, kepemilikan aset, akses terhadap layanan keuangan, serta karakteristik pasar asuransi masing-masing provinsi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya prasyarat bagi ekspansi premi. Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi pertumbuhan premi negatif justru menunjukkan adanya potensi ekonomi yang belum sepenuhnya terkonversi menjadi permintaan terhadap perlindungan asuransi.

Dengan demikian, temuan pada 2025 menunjukkan bahwa korelasi negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan premi di Pulau Jawa lebih mencerminkan adanya perbedaan mekanisme transmisi pertumbuhan ekonomi ke pasar asuransi antarwilayah, bukan berarti pertumbuhan ekonomi secara teoritis berdampak negatif terhadap permintaan asuransi. Hubungan ini menjadi dasar untuk melihat faktor lain, seperti investasi, ketenagakerjaan, kredit perbankan, dan karakteristik sosial ekonomi, dalam menjelaskan perkembangan premi pada masing-masing provinsi.

Gambar 5.2 PDRB ADHB dan Total Premi Asuransi Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 & Otoritas Jasa Keuangan, 2026 (diolah)

Selanjutnya, PDRB dan premi asuransi diperkirakan memiliki hubungan positif, karena semakin besar skala aktivitas ekonomi suatu wilayah, semakin besar pula potensi pendapatan, kepemilikan aset, aktivitas usaha, dan kebutuhan terhadap perlindungan risiko. Hasil pada Pulau Jawa tahun 2025 menunjukkan pola yang positif, sejalan dengan ekspektasi teoritis. Namun, hubungan tersebut belum sepenuhnya kuat karena masih terdapat perbedaan yang cukup besar antarprovinsi dalam mengonversikan besarnya aktivitas ekonomi menjadi premi asuransi.

DKI Jakarta menjadi titik yang paling menonjol, dengan PDRB ADHB sekitar Rp3.900 triliun dan total premi asuransi sekitar Rp160 triliun. Posisi ini menunjukkan bahwa sebagai pusat aktivitas ekonomi dan jasa keuangan, Jakarta memiliki kemampuan yang jauh lebih besar dalam mengonversikan kapasitas ekonomi regional menjadi aktivitas pasar asuransi. Sebaliknya, Jawa Barat memiliki PDRB yang juga sangat besar, sekitar Rp3.000 triliun, tetapi premi asuransinya hanya sekitar Rp20 triliun. Perbedaan ini menunjukkan bahwa besarnya PDRB tidak selalu diterjemahkan secara proporsional menjadi premi asuransi.

Pola yang sama terlihat pada Jawa Timur, yang memiliki PDRB sekitar Rp3.400 triliun namun premi sekitar Rp18 triliun, sedangkan Jawa Tengah dengan PDRB sekitar Rp1.900 triliun hanya menghasilkan premi sekitar Rp8 triliun. Di sisi lain, DI Yogyakarta memiliki PDRB relatif kecil, sekitar Rp200 triliun, tetapi tetap menghasilkan premi sekitar Rp2–3 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi, karakteristik pasar, dan tingkat integrasi masyarakat maupun pelaku usaha dengan layanan keuangan turut menentukan besarnya premi di luar sekadar ukuran perekonomian.

Secara regional, temuan ini menunjukkan bahwa skala ekonomi merupakan salah satu fondasi penting bagi perkembangan pasar asuransi, tetapi bukan satu-satunya faktor penentu. PDRB yang besar menyediakan basis ekonomi dan aset yang dapat diasuransikan, tetapi kemampuan ekonomi tersebut baru akan menghasilkan pasar asuransi yang besar apabila didukung oleh akses layanan keuangan, formalitas ekonomi, kepemilikan aset, literasi keuangan, dan karakteristik kebutuhan proteksi masyarakat maupun dunia usaha. Dengan demikian, provinsi seperti Jawa Barat dan Jawa Timur dapat dipandang memiliki basis ekonomi yang besar tetapi potensi pasar asuransi yang belum sepenuhnya termonetisasi, terutama bila dibandingkan dengan dominasi DKI Jakarta.

Secara keseluruhan, korelasi positif antara PDRB ADHB dan premi asuransi memperlihatkan bahwa semakin besar kapasitas ekonomi suatu provinsi, cenderung semakin besar pula pasar asuransinya. Namun, penyebaran titik yang cukup lebar juga menunjukkan adanya ketimpangan tingkat konversi kapasitas ekonomi menjadi permintaan asuransi antarprovinsi di Pulau Jawa. Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa ekspansi pasar asuransi tidak cukup hanya berorientasi pada wilayah dengan PDRB terbesar, tetapi juga perlu memperhatikan provinsi yang memiliki basis ekonomi besar namun tingkat pemanfaatan asuransinya masih relatif rendah.

5.2 Analisis Investasi Terhadap Asuransi Umum

Secara teoritis, investasi dan premi asuransi umum diperkirakan memiliki hubungan positif, karena peningkatan investasi akan memperluas aktivitas proyek, aset produktif, dan kegiatan usaha yang pada akhirnya meningkatkan kebutuhan terhadap perlindungan risiko. Investasi yang lebih besar juga menciptakan lebih banyak objek yang dapat diasuransikan, khususnya pada sektor properti, konstruksi, kendaraan, pengangkutan, dan aset usaha. Hasil pada enam provinsi di Pulau Jawa tahun 2025 menunjukkan korelasi positif dengan kekuatan hubungan yang moderat, sehingga secara umum peningkatan investasi cenderung diikuti oleh peningkatan premi asuransi umum.

Namun, pola antarprovinsi menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak sepenuhnya proporsional. DKI Jakarta menjadi contoh paling jelas karena memiliki tingkat investasi yang tinggi sekaligus premi asuransi umum yang paling besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa akumulasi investasi di pusat aktivitas ekonomi dapat secara langsung memperluas basis aset dan kegiatan usaha yang membutuhkan perlindungan asuransi.

Sebaliknya, Jawa Barat memperlihatkan pola yang cukup berbeda. Provinsi ini memiliki nilai investasi sekitar Rp300 triliun, tetapi premi asuransi umumnya jauh lebih rendah dibandingkan DKI Jakarta. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa besarnya investasi belum otomatis menghasilkan premi asuransi yang sebanding. Hal

ini dapat berkaitan dengan komposisi investasi, karakteristik proyek yang dibiayai, struktur kepemilikan aset, maupun tingkat penggunaan produk asuransi dalam aktivitas investasi tersebut.

Gambar 5.3 Investasi dan Premi Asuransi Umum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 & Otoritas Jasa Keuangan, 2026 (diolah)

DI Yogyakarta juga menunjukkan karakter yang menarik, dengan investasi relatif rendah tetapi tetap menghasilkan premi asuransi umum yang relatif lebih tinggi dibandingkan beberapa provinsi dengan investasi lebih besar, seperti Banten dan Jawa Tengah. Sementara itu, Jawa Timur memiliki investasi yang cukup besar namun premi asuransi umumnya masih berada di bawah DKI Jakarta. Pola ini mengindikasikan bahwa struktur investasi dan tingkat keterhubungannya dengan industri asuransi lebih penting daripada sekadar besarnya nilai investasi secara nominal.

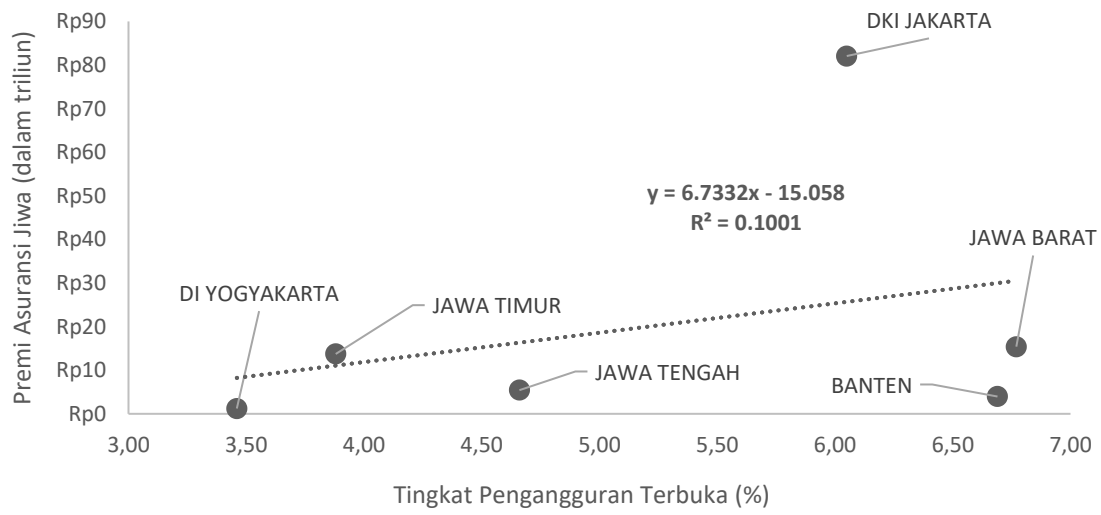
Secara keseluruhan, korelasi positif tersebut menunjukkan bahwa investasi merupakan salah satu faktor yang mendukung perkembangan pasar asuransi umum di Pulau Jawa. Namun, penyebaran antarprovinsi juga memperlihatkan adanya perbedaan tingkat konversi investasi menjadi permintaan proteksi asuransi. Dengan demikian, wilayah dengan investasi tinggi tetapi premi relatif rendah, seperti Jawa Barat, dapat menunjukkan adanya ruang pengembangan pasar asuransi umum yang belum sepenuhnya termanfaatkan, khususnya untuk perlindungan aset, proyek, dan aktivitas usaha.

5.3 Analisis Tingkat Pengangguran Terhadap Asuransi Jiwa

Secara teoritis, tingkat pengangguran dan premi asuransi jiwa cenderung diharapkan memiliki hubungan negatif, karena meningkatnya pengangguran dapat menekan pendapatan rumah tangga, mempersempit kemampuan membayar premi, serta mengurangi kapasitas masyarakat dalam melakukan perencanaan keuangan jangka panjang. Namun, hasil pada Pulau Jawa tahun 2025 menunjukkan korelasi positif yang relatif lemah, sehingga pola empiris tidak sepenuhnya mengikuti hubungan teoritis tersebut.

Pola positif tersebut terutama terlihat dari perbedaan karakter antarprovinsi. DKI Jakarta memiliki tingkat pengangguran sekitar 6,05% dan sekaligus mencatat premi asuransi jiwa yang sangat tinggi, sekitar Rp82 triliun dalam agregasi yang digunakan pada analisis ini. Sebaliknya, DI Yogyakarta memiliki tingkat pengangguran paling rendah, sekitar 3,46%, tetapi premi jiwanya berada pada tingkat yang jauh lebih kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa besarnya pasar asuransi jiwa tidak semata-mata ditentukan oleh rendah atau tingginya tingkat pengangguran.

Gambar 5.4 Tingkat Pengagguran Terbuka dan Premi Asuransi Jiwa Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 & Otoritas Jasa Keuangan, 2026 (diolah)

Fenomena tersebut juga terlihat pada Jawa Barat dan Banten. Keduanya memiliki tingkat pengangguran relatif tinggi, masing-masing sekitar 6,77% dan 6,69%, tetapi nilai premi asuransi jiwa berada pada tingkat yang berbeda. Jawa Barat memiliki premi yang jauh lebih besar dibandingkan Banten, meskipun tingkat penganggurannya relatif berdekatan. Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran dan struktur pasar tenaga kerja, tingkat pendapatan, formalitas pekerjaan, serta akses terhadap layanan keuangan kemungkinan memiliki peran lebih besar dalam menentukan kapasitas pasar asuransi jiwa dibandingkan tingkat pengangguran semata.

Dengan demikian, korelasi positif yang terlihat pada 2025 lebih tepat dipahami sebagai pola hubungan antarwilayah, bukan sebagai bukti bahwa meningkatnya pengangguran mendorong pertumbuhan premi asuransi jiwa. Besarnya pengaruh DKI Jakarta sebagai observasi dengan skala premi yang sangat tinggi juga dapat memengaruhi arah hubungan agregat. Karena itu, hasil ini menunjukkan bahwa indikator pengangguran saja belum cukup untuk menjelaskan perkembangan pasar asuransi jiwa di Pulau Jawa.

Secara keseluruhan, temuan tersebut memperkuat bahwa keterkaitan pasar tenaga kerja dengan asuransi jiwa bersifat multidimensional. Tingkat pengangguran perlu dibaca bersama dengan kualitas pekerjaan, formalitas tenaga kerja, tingkat pendapatan, dan kapasitas finansial rumah tangga. Dengan pendekatan tersebut, wilayah dengan tingkat pengangguran relatif tinggi tetapi memiliki basis tenaga kerja formal dan pendapatan yang lebih kuat tetap dapat memiliki pasar asuransi jiwa yang besar.

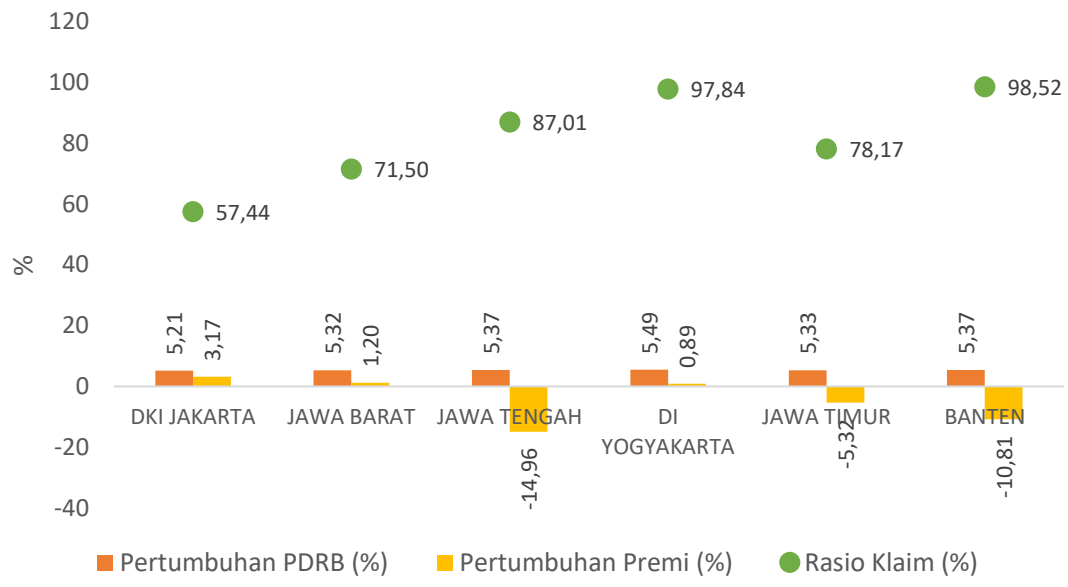
5.4 Pertumbuhan PDRB, Premi, dan Klaim

Perbandingan pertumbuhan PDRB, pertumbuhan premi, dan rasio klaim memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika industri asuransi di Pulau Jawa. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan ekspansi aktivitas ekonomi regional, pertumbuhan premi menggambarkan perubahan kapasitas pasar asuransi, sedangkan rasio klaim menunjukkan besarnya beban pembayaran klaim relatif terhadap premi yang diterima. Ketiga indikator tersebut penting dibaca secara bersamaan karena pertumbuhan ekonomi dan premi yang tinggi belum tentu diikuti oleh tekanan klaim yang rendah, demikian pula perlambatan premi tidak selalu berarti penurunan beban klaim.

Pada tahun 2025, seluruh provinsi di Pulau Jawa mencatat pertumbuhan PDRB yang positif di atas 5%, tetapi perkembangan premi menunjukkan pola yang jauh lebih beragam. DKI Jakarta, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta masih mencatat pertumbuhan premi positif masing-masing sebesar 3,17%, 1,20%, dan 0,89%. Sebaliknya, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten mengalami kontraksi premi masing-masing sebesar -14,96%, -5,32%, dan -10,81%, meskipun ketiganya tetap mencatat pertumbuhan ekonomi yang kuat. Pola tersebut kembali memperlihatkan bahwa ekspansi ekonomi regional belum secara otomatis diterjemahkan menjadi pertumbuhan pasar asuransi.

Dari sisi rasio klaim, terdapat perbedaan yang cukup besar antarprovinsi. Banten mencatat rasio klaim tertinggi sebesar 98,52%, diikuti Jawa Tengah sebesar 97,84% dan DI Yogyakarta sebesar 87,01%. Sementara itu, Jawa Timur berada pada 78,17%, Jawa Barat 71,50%, dan DKI Jakarta memiliki rasio klaim terendah sebesar 57,44%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tekanan klaim relatif tidak sejalan dengan besarnya pertumbuhan ekonomi maupun pertumbuhan premi masing-masing wilayah.

Gambar 5.5 Pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan Premi, dan Rasio Klaim Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 & Otoritas Jasa Keuangan, 2026 (diolah)

Kondisi Jawa Tengah dan Banten menjadi perhatian karena keduanya mengalami pertumbuhan premi negatif yang cukup dalam, tetapi tetap memiliki rasio klaim yang sangat tinggi, masing-masing hampir mencapai 100%. Artinya, penurunan penerimaan premi tidak secara langsung diikuti oleh penurunan beban klaim, sehingga secara relatif tekanan terhadap kinerja underwriting justru menjadi lebih besar. Sebaliknya, DKI Jakarta mampu mempertahankan pertumbuhan premi positif sebesar 3,17% dengan rasio klaim yang lebih rendah, sehingga menunjukkan kondisi pasar yang relatif lebih seimbang antara penerimaan premi dan pembayaran klaim.

DI Yogyakarta juga menunjukkan karakter yang berbeda. Pertumbuhan ekonominya mencapai 5,49% dan premi tumbuh 0,89%, tetapi rasio klaim mencapai 87,01%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pasar masih tumbuh, kenaikan premi belum sepenuhnya diikuti oleh kondisi klaim yang lebih ringan. Sementara itu, Jawa Timur mengalami kontraksi premi sebesar 5,32% dengan rasio klaim 78,17%, yang menunjukkan tekanan relatif lebih moderat dibandingkan Jawa Tengah dan Banten.

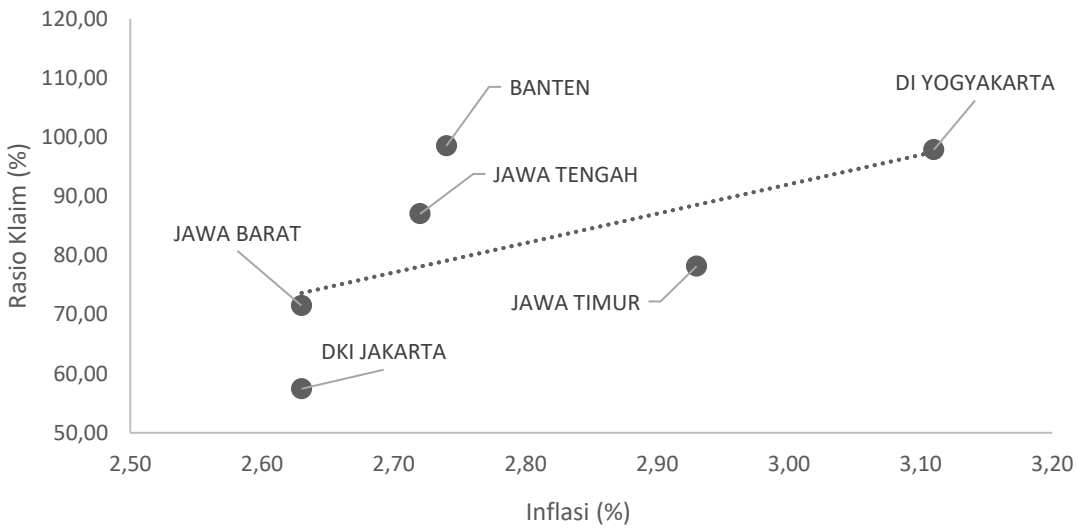
Secara keseluruhan, kombinasi ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan premi, dan tekanan klaim memiliki dinamika yang tidak selalu bergerak searah. Pertumbuhan ekonomi yang kuat merupakan fondasi bagi aktivitas industri asuransi, tetapi kemampuan pasar dalam menghasilkan premi dan menjaga keseimbangan klaim sangat dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing wilayah. Dengan demikian, evaluasi kinerja industri asuransi regional tidak cukup hanya melihat pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan premi, tetapi perlu mempertimbangkan keseimbangan antara ekspansi pasar dan beban klaim sebagai indikator kualitas pertumbuhan industri.

5.5 Inflasi dan Rasio Klaim

Secara teoritis, inflasi dan rasio klaim asuransi diperkirakan memiliki hubungan positif. Peningkatan harga barang dan jasa dapat meningkatkan biaya penggantian aset, biaya perbaikan, maupun biaya layanan yang menjadi dasar pembayaran klaim. Selain itu, kenaikan harga juga dapat meningkatkan nilai nominal kewajiban perusahaan asuransi ketika risiko yang dipertanggungkan direalisasikan.

Hasil pada enam provinsi di Pulau Jawa tahun 2025 menunjukkan bahwa inflasi memiliki korelasi positif dengan rasio klaim. Provinsi dengan tingkat inflasi yang relatif lebih tinggi cenderung memiliki rasio klaim yang lebih tinggi. DI Yogyakarta mencatat inflasi tertinggi sebesar 3,11% dengan rasio klaim sebesar 97,84%, sedangkan Banten memiliki inflasi 2,74% dengan rasio klaim tertinggi, yaitu 98,52%. Sebaliknya, DKI Jakarta dan Jawa Barat yang memiliki inflasi relatif rendah sebesar 2,63% masing-masing memiliki rasio klaim sebesar 57,44% dan 71,50%.

Gambar 5.6 Inflasi dan Rasio Klaim Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 & Otoritas Jasa Keuangan, 2026 (diolah)

Pola tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga dapat berjalan searah dengan meningkatnya beban klaim, meskipun hubungan antarprovinsi tidak sepenuhnya seragam. Banten menjadi contoh penting karena memiliki tingkat inflasi yang tidak paling tinggi, tetapi rasio klaimnya justru paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi bukan satu-satunya faktor yang menentukan tingkat rasio klaim, melainkan berinteraksi dengan karakteristik risiko, komposisi portofolio, dan kondisi pasar asuransi masing-masing wilayah.

Di sisi lain, DI Yogyakarta memperlihatkan pola yang cukup konsisten dengan hubungan teoritis, dengan tingkat inflasi tertinggi sekaligus rasio klaim yang sangat tinggi. Sementara itu, DKI Jakarta memiliki inflasi yang relatif sama dengan Jawa Barat

tetapi rasio klaim yang jauh lebih rendah. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa sensitivitas klaim terhadap tekanan harga berbeda antarwilayah, sehingga peningkatan inflasi tidak selalu menghasilkan kenaikan rasio klaim dalam besaran yang sama.

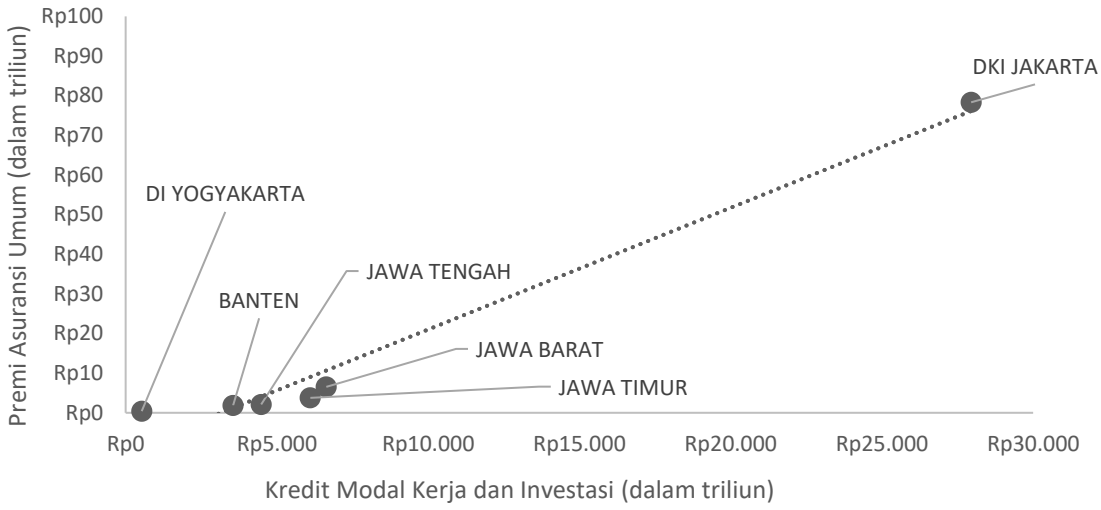
Secara keseluruhan, korelasi positif tersebut menunjukkan bahwa tekanan inflasi berpotensi meningkatkan tekanan klaim, terutama melalui kenaikan biaya ekonomi yang terkait dengan pemulihan kerugian. Namun, hubungan ini lebih tepat dipahami sebagai keterkaitan regional daripada hubungan sebab-akibat langsung. Karakteristik portofolio risiko, struktur premi, jenis aset yang diasuransikan, serta efektivitas manajemen risiko tetap menjadi faktor penting dalam menentukan bagaimana perubahan inflasi diterjemahkan ke dalam rasio klaim di masing-masing provinsi.

5.6 Kredit Perbankan dan Asuransi

Kredit perbankan merupakan salah satu indikator yang mencerminkan intensitas aktivitas ekonomi dan kapasitas pembiayaan di suatu wilayah. Dalam kaitannya dengan industri asuransi, kredit modal kerja dan investasi secara teoritis memiliki hubungan positif dengan premi asuransi umum karena peningkatan pembiayaan usaha dan investasi akan memperluas aktivitas produksi, kepemilikan aset, serta proyek yang membutuhkan perlindungan terhadap berbagai risiko. Sementara itu, kredit konsumsi lebih berkaitan dengan pembiayaan rumah tangga dan secara teoritis dapat memperluas kebutuhan terhadap perlindungan jiwa dan aset, meskipun hubungan tersebut dapat dipengaruhi oleh karakteristik pendapatan dan perilaku keuangan masyarakat.

Berdasarkan Gambar di bawah, terdapat korelasi positif yang sangat kuat antara kredit modal kerja dan investasi dengan premi asuransi umum di Pulau Jawa pada 2025. DKI Jakarta menjadi titik paling dominan, dengan nilai kredit modal kerja dan investasi yang sangat besar sekaligus premi asuransi umum yang jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Jawa Barat juga memiliki tingkat kredit yang tinggi, tetapi premi asuransinya masih jauh di bawah DKI Jakarta. Sementara itu, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan DI Yogyakarta memiliki nilai kredit yang lebih rendah dan premi asuransi umum yang juga relatif kecil. Pola ini menunjukkan bahwa semakin besar aktivitas pembiayaan usaha dan investasi, semakin besar pula basis aset dan kegiatan ekonomi yang berpotensi membutuhkan perlindungan asuransi umum.

Gambar 5.7 Kredit Modal Kerja + Investasi dan Premi Asuransi Umum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2025

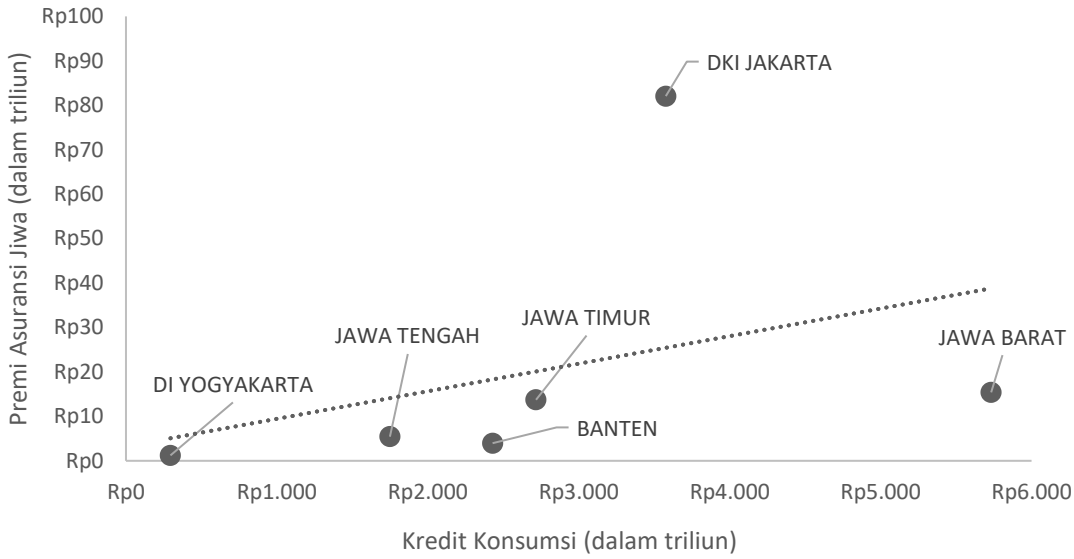


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 & Otoritas Jasa Keuangan, 2026 (diolah)

Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa kredit produktif memiliki keterkaitan yang erat dengan perkembangan pasar asuransi umum. Pembiayaan modal kerja dan investasi biasanya berkaitan dengan pembelian aset, pembangunan fasilitas, pengembangan usaha, serta aktivitas produksi yang menciptakan eksposur risiko baru. Dengan demikian, peningkatan kredit produktif tidak hanya memperbesar kapasitas ekonomi, tetapi juga memperluas objek yang dapat diasuransikan. Perbedaan antara DKI Jakarta dan Jawa Barat juga menunjukkan bahwa besarnya pembiayaan saja belum sepenuhnya menentukan nilai premi, karena konversi aktivitas kredit menjadi kebutuhan proteksi juga dipengaruhi oleh struktur dan kedalaman pasar asuransi di masing-masing wilayah.

Sementara itu, Gambar di bawah menunjukkan korelasi positif namun relatif lemah antara kredit konsumsi dan premi asuransi jiwa. DKI Jakarta kembali menjadi observasi yang paling menonjol karena memiliki kredit konsumsi yang relatif besar sekaligus premi asuransi jiwa yang jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lain. Namun, pola pada provinsi lainnya lebih tersebar. Jawa Barat memiliki kredit konsumsi tertinggi di antara provinsi selain Jakarta, tetapi premi asuransi jiwanya masih jauh berada di bawah Jakarta. DI Yogyakarta memiliki kredit konsumsi yang relatif rendah dengan premi jiwa yang juga rendah, sementara Jawa Timur memiliki kredit konsumsi lebih tinggi tetapi premi jiwa tidak meningkat secara proporsional.

Gambar 5.8 Kredit Konsumsi dan Premi Asuransi Jiwa Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 & Otoritas Jasa Keuangan, 2026 (diolah)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kredit konsumsi memiliki keterkaitan yang lebih lemah dengan perkembangan premi asuransi jiwa dibandingkan kredit produktif dengan asuransi umum. Hal ini cukup logis karena keputusan membeli asuransi jiwa tidak hanya bergantung pada kemampuan masyarakat memperoleh kredit, tetapi juga pada pendapatan, formalitas pekerjaan, struktur rumah tangga, kesadaran terhadap risiko, serta kemampuan melakukan perencanaan keuangan jangka panjang. Dengan demikian, peningkatan kredit konsumsi belum tentu langsung diterjemahkan menjadi peningkatan permintaan terhadap proteksi jiwa.

Secara keseluruhan, kedua hubungan tersebut memperlihatkan bahwa jenis kredit memiliki keterkaitan yang berbeda dengan lini asuransi. Kredit modal kerja dan investasi menunjukkan hubungan yang sangat kuat dengan premi asuransi umum karena secara langsung berkaitan dengan aktivitas usaha dan aset yang memiliki eksposur risiko. Sebaliknya, kredit konsumsi memiliki hubungan yang lebih lemah dengan premi asuransi jiwa, menunjukkan bahwa pasar jiwa lebih dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi dan perilaku keuangan rumah tangga daripada aktivitas kredit konsumsi semata. Temuan ini memperkuat pentingnya membedakan karakteristik determinan asuransi umum dan asuransi jiwa dalam membaca perkembangan industri asuransi di Pulau Jawa.

6. PROVINCIAL INSURANCE MARKET DIAGNOSIS

6.1 Provinsi DKI Jakarta: *Mature / High-Value Market*

DKI Jakarta memiliki posisi yang sangat dominan dalam lanskap industri asuransi di Pulau Jawa. Posisi tersebut sejalan dengan perannya sebagai pusat kegiatan ekonomi, bisnis, jasa keuangan, investasi, dan konsumsi nasional. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta mencapai 5,21%, sementara PDRB per kapitanya sekitar Rp212 juta, jauh di atas provinsi lain di Pulau Jawa. Struktur ekonomi yang kuat pada sektor jasa, perdagangan, keuangan, dan aktivitas korporasi membentuk basis permintaan yang besar terhadap berbagai produk perlindungan, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun dunia usaha. Namun, Jakarta juga memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang kompleks, termasuk Gini Ratio sebesar 0,423 pada 2025, tertinggi di antara enam provinsi di Pulau Jawa. Dengan demikian, besarnya skala pasar asuransi Jakarta perlu dibaca bersama isu kedalaman dan pemerataan akses terhadap perlindungan.

6.1.1 Lanskap Industri Asuransi Umum dan Jiwa di Provinsi DKI Jakarta

Tabel 6.1 Lanskap Industri Asuransi Umum dan Jiwa di Provinsi DKI Jakarta

Asuransi Umum	Asuransi Jiwa
DKI Jakarta merupakan pusat utama pasar asuransi umum di Pulau Jawa dengan kinerja yang menunjukkan tren ekspansi kuat selama 2023–2025. Premi asuransi umum konvensional meningkat konsisten. Peningkatan ini mencerminkan kuatnya basis permintaan yang berasal dari aktivitas korporasi, perdagangan, properti, pembiayaan, transportasi, dan berbagai aset ekonomi bernilai tinggi di Jakarta. Di sisi lain, nilai klaim juga meningkat sepanjang 2023-2025, yang menunjukkan bahwa ekspansi pasar diikuti oleh meningkatnya eksposur risiko yang harus dikelola industri. Secara keseluruhan, lanskap asuransi umum di DKI Jakarta menunjukkan pasar yang besar, dinamis, dan sangat	Pasar asuransi jiwa DKI Jakarta juga merupakan yang terbesar di Pulau Jawa, tetapi perkembangannya cenderung lebih stabil dibandingkan asuransi umum. Meskipun pertumbuhan premi belum kembali ke level awal periode, nilai klaim justru mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan tekanan klaim dan mengindikasikan bahwa stabilitas portofolio mulai membaik. Namun demikian, perlambatan pertumbuhan premi menandakan bahwa pasar asuransi jiwa Jakarta telah memasuki fase yang lebih matang, sehingga membutuhkan inovasi produk dan strategi penetrasi yang lebih mendalam untuk mendorong pertumbuhan lanjutan.

terkait dengan kompleksitas aktivitas bisnis perkotaan.	

6.1.2 Peluang dan Tantangan Asuransi di Provinsi DKI Jakarta

Peluang dan tantangan untuk industri asuransi di Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

Tabel 6.2 Peluang dan Tantangan Asuransi di Provinsi DKI Jakarta

Peluang	Tantangan
• Skala ekonomi, pendapatan per kapita, serta konsentrasi aktivitas bisnis yang sangat tinggi memberikan basis kuat bagi pengembangan asuransi umum. Aktivitas korporasi, perdagangan, properti, pembiayaan, transportasi, dan investasi membuka peluang pengembangan produk *property insurance*, kendaraan, *engineering*, *liability*, *business interruption*, hingga perlindungan terhadap risiko siber dan risiko usaha baru. • Posisi DKI Jakarta sebagai pusat jasa keuangan dan ekonomi digital membuka peluang pengembangan *embedded insurance*, bancassurance digital, *credit protection*, serta kolaborasi perusahaan asuransi dengan perbankan, fintech, dan platform digital. Integrasi produk asuransi dengan ekosistem keuangan digital dapat memperluas distribusi sekaligus menurunkan biaya akuisisi konsumen. • Tingginya pendapatan, basis pekerja formal, dan kebutuhan perencanaan keuangan masyarakat perkotaan memberikan ruang bagi pengembangan asuransi jiwa, kesehatan tambahan, proteksi pendapatan, serta produk pensiun dan perencanaan keuangan jangka panjang. Premi per kapita DKI Jakarta yang jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lain menunjukkan adanya basis konsumen dengan kapasitas finansial yang kuat untuk pengembangan produk dengan	• Penetrasi asuransi terhadap PDRB menunjukkan tren menurun, dari sekitar 4,74% pada 2023 menjadi 4,09% pada 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan premi belum sepenuhnya mampu mengikuti ekspansi skala ekonomi Jakarta, sehingga tantangannya bukan lagi hanya memperbesar volume premi, tetapi memperdalam pemanfaatan asuransi dalam aktivitas ekonomi. • Ketimpangan ekonomi yang masih tinggi, dengan Gini Ratio sebesar 0,423 pada 2025, menunjukkan bahwa besarnya pasar asuransi belum tentu mencerminkan pemerataan akses perlindungan. Tingginya premi per kapita dapat terkonsentrasi pada korporasi dan kelompok berpendapatan tinggi, sementara kelompok masyarakat lainnya masih membutuhkan produk yang lebih sederhana dan terjangkau. • Pertumbuhan asuransi jiwa relatif lebih lemah dibandingkan asuransi umum, sementara premi asuransi jiwa dan umum syariah juga mengalami penurunan selama 2023–2025. Selain itu, meningkatnya biaya layanan kesehatan dapat memberikan tekanan terhadap klaim dan keterjangkauan premi. Kondisi ini menuntut inovasi produk, penguatan *underwriting*, efisiensi pengelolaan klaim, serta

perlindungan lebih dalam dan terpersonalisasi.	strategi segmentasi dan distribusi yang lebih efektif.

6.2 Provinsi Jawa Barat: *Industrial & Mass Market*

Jawa Barat merupakan salah satu pusat ekonomi terbesar di Pulau Jawa dengan karakter utama berupa basis industri pengolahan yang sangat kuat. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mencapai sekitar 5,32%, sementara kontribusi industri pengolahan mencapai 40,41%, tertinggi di antara provinsi di Pulau Jawa. Struktur ini menjadikan Jawa Barat sebagai wilayah dengan konsentrasi kegiatan manufaktur, rantai pasok, logistik, kawasan industri, dan investasi yang besar. Namun, dibandingkan skala ekonominya, kedalaman pasar asuransi Jawa Barat masih relatif terbatas. Tingkat penetrasi asuransi menurun dari 1,46% pada 2023 menjadi 0,72% pada 2025, sedangkan premi per kapita turun dari sekitar Rp0,77 juta menjadi Rp0,43 juta. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang yang cukup besar bagi pengembangan pasar asuransi di Jawa Barat.

6.2.1 Lanskap Industri Asuransi Umum dan Jiwa di Provinsi Jawa Barat

Tabel 6.3 Lanskap Industri Asuransi Umum dan Jiwa di Provinsi Jawa Barat

Asuransi Umum	Asuransi Jiwa
Jawa Barat merupakan salah satu pasar utama asuransi umum di luar DKI Jakarta. Kondisi tersebut sejalan dengan kuatnya basis industri manufaktur, investasi, perdagangan, kendaraan, serta aktivitas logistik dan konstruksi di Jawa Barat. Pada sisi klaim, rasio klaim asuransi umum konvensional menurun menjadi sekitar 38,07% pada 2025, menunjukkan tekanan klaim yang relatif terkendali dibandingkan premi. Namun, pada segmen syariah, premi asuransi umum masih sangat kecil dan menurun sepanjang 2023-2025.	Pasar asuransi jiwa Jawa Barat memiliki skala terbesar kedua setelah DKI Jakarta, tetapi mengalami tren pelemahan selama 2023–2025. Pada 2025, rasio klaim jiwa konvensional berada pada kisaran 87,57%, menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan premi masih terserap untuk pembayaran klaim. Tekanan juga terlihat pada segmen jiwa syariah, di mana premi turun sangat tajam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun basis pasar Jawa Barat besar, penguatan pertumbuhan dan keberlanjutan portofolio jiwa masih menjadi tantangan penting.

6.2.2 Peluang dan Tantangan Asuransi di Provinsi Jawa Barat

Peluang dan tantangan untuk industri asuransi di Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

Tabel 6.4 Peluang dan Tantangan Asuransi di Provinsi Jawa Barat

Peluang	Tantangan
• Dominasi sektor industri pengolahan yang mencapai sekitar 40,41% dari struktur ekonomi Jawa Barat memberikan basis pasar yang sangat kuat bagi asuransi umum. Konsentrasi manufaktur, kawasan industri, aset produksi, mesin, gudang, logistik, dan rantai pasok membuka peluang bagi pengembangan *property insurance*, *engineering insurance*, marine cargo, kendaraan komersial, *business interruption*, dan perlindungan risiko industri lainnya. • Besarnya investasi dan aktivitas manufaktur menjadikan Jawa Barat potensial untuk pengembangan produk asuransi korporasi dan komersial. Kebutuhan perlindungan terhadap aset, proyek investasi, rantai pasok, transportasi, serta risiko operasional dapat menjadi sumber pertumbuhan pasar, terutama bagi asuransi umum yang pada 2025 mulai menunjukkan pemulihan premi. • Jumlah penduduk yang besar memberikan potensi pasar ritel yang luas, khususnya bagi asuransi jiwa, kesehatan tambahan, pendidikan, kendaraan, mikroasuransi, serta produk yang dapat didistribusikan melalui perbankan dan kanal digital. Dengan premi per kapita yang masih	• Penetrasi asuransi turun cukup tajam dari 1,46% pada 2023 menjadi 0,72% pada 2025, sementara premi per kapita turun dari Rp0,77 juta menjadi sekitar Rp0,43 juta. Kondisi ini menunjukkan bahwa besarnya basis ekonomi dan populasi Jawa Barat belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kedalaman pasar asuransi yang kuat. • Premi asuransi jiwa menunjukkan tren menurun sepanjang 2023-2025. Rasio klaim jiwa konvensional yang masih berada pada kisaran tinggi menunjukkan perlunya penguatan *underwriting*, segmentasi produk, dan strategi retensi agar pasar jiwa kembali tumbuh secara sehat. • Segmen asuransi syariah mengalami kontraksi yang sangat tajam, terutama pada asuransi jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa besarnya populasi dan basis ekonomi Jawa Barat belum otomatis menghasilkan pasar syariah yang kuat, sehingga diperlukan evaluasi terhadap desain produk, distribusi, harga, serta positioning produk syariah.

relatif rendah, peluang ekspansi tidak hanya berada pada peningkatan nilai premi per nasabah, tetapi juga pada perluasan basis pemegang polis.	

6.3 Provinsi Jawa Tengah: *Emerging / Affordable Mass Market*

Jawa Tengah memiliki karakter ekonomi yang cukup kuat pada sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi. Pada tahun 2025, kontribusi industri pengolahan mencapai sekitar 33,39% terhadap struktur ekonomi provinsi, sedangkan aktivitas konstruksi juga relatif tinggi. Di sisi ketenagakerjaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mencapai 74,36%, termasuk yang tertinggi di Pulau Jawa, meskipun proporsi pekerja formal masih sebesar 41,21%. Kondisi tersebut menunjukkan basis aktivitas ekonomi dan tenaga kerja yang besar, tetapi masih disertai tingkat informalitas yang relatif tinggi. Dari perspektif industri asuransi, Jawa Tengah memiliki tantangan utama berupa rendahnya kedalaman pasar, yang tercermin dari penetrasi asuransi sebesar hanya 0,39% pada 2025, terendah di Pulau Jawa, serta premi per kapita yang turun menjadi sekitar Rp0,20 juta.

6.3.1 Lanskap Industri Asuransi Umum dan Jiwa di Provinsi Jawa Tengah

Tabel 6.5 Lanskap Industri Asuransi Umum dan Jiwa di Provinsi Jawa Tengah

Asuransi Umum	Asuransi Jiwa
Pasar asuransi umum Jawa Tengah menunjukkan tren pelemahan selama periode 2023–2025. Klaim juga mengalami penurunan di tahun 2025 setelah sempat meningkat di tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Jawa Tengah memiliki basis industri manufaktur, perdagangan, konstruksi, dan aktivitas ekonomi yang besar, perkembangan premi asuransi umum belum sepenuhnya mengikuti potensi ekonominya.	Asuransi jiwa Jawa Tengah juga menunjukkan kecenderungan menurun dari sisi premi. Disamping itu, jika lini konvensional dan syariah digabungkan, rasio klaim jiwa meningkat tercatat tinggi, menunjukkan tekanan klaim yang semakin besar dibandingkan penerimaan premi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pasar jiwa Jawa Tengah masih memiliki basis yang cukup besar, tetapi menghadapi tantangan dari sisi pertumbuhan premi dan keberlanjutan portofolio.

6.3.2 Peluang dan Tantangan Asuransi di Provinsi Jawa Tengah

Peluang dan tantangan untuk industri asuransi di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel 6.6 Peluang dan Tantangan Asuransi di Provinsi Jawa Tengah

Peluang	Tantangan
• Basis industri pengolahan yang besar, mencapai sekitar 33,39% dari struktur ekonomi, serta kontribusi konstruksi yang relatif tinggi memberikan peluang bagi pengembangan asuransi umum. Produk perlindungan aset industri, mesin, proyek konstruksi, logistik, kendaraan komersial, *marine cargo*, dan *business interruption* memiliki potensi untuk dikembangkan lebih luas. • Tingginya TPAK sebesar 74,36% menunjukkan basis penduduk produktif yang besar, yang dapat menjadi pasar potensial bagi asuransi jiwa, kesehatan tambahan, pendidikan, dan perlindungan pendapatan. Selain itu, besarnya basis tenaga kerja juga membuka peluang pengembangan produk mikroasuransi dan proteksi yang dapat disesuaikan dengan karakter pekerja informal. • Aktivitas ekonomi perdesaan dan basis UMKM yang luas memberikan ruang bagi pengembangan asuransi mikro, asuransi usaha, perlindungan pertanian, serta produk berbasis komunitas dan distribusi digital. Selain itu, jumlah desa yang berstatus Maju dan Berkembang cukup besar, menunjukkan adanya	• Penetrasi asuransi Jawa Tengah hanya sekitar 0,39% pada 2025, terendah di Pulau Jawa. Premi per kapita juga turun dari sekitar Rp0,34 juta menjadi Rp0,20 juta. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara skala aktivitas ekonomi dan kedalaman pemanfaatan asuransi. • Proporsi tenaga kerja formal masih relatif rendah, yaitu sekitar 41,21% pada 2025, sehingga sebagian besar tenaga kerja masih berada pada sektor informal. Kondisi ini dapat membatasi kemampuan membayar premi secara rutin dan menuntut desain produk yang lebih fleksibel, terjangkau, dan sesuai dengan pola pendapatan masyarakat. • Eksposur risiko bencana relatif tinggi, dengan Jawa Tengah mencatat sekitar 335 kejadian bencana pada 2025, terutama banjir dan cuaca ekstrem. Kondisi ini meningkatkan kebutuhan proteksi tetapi pada saat yang sama juga meningkatkan risiko klaim, sehingga perusahaan asuransi perlu memperkuat *risk assessment*, pricing, dan strategi mitigasi risiko berbasis wilayah.

ruang untuk memperluas akses asuransi di luar wilayah perkotaan.	

6.4 Provinsi DI Yogyakarta: *Service, Education & Tourism Market*

DI Yogyakarta memiliki karakter ekonomi yang berbeda dibandingkan sebagian besar provinsi lain di Pulau Jawa. Struktur ekonominya lebih banyak ditopang oleh sektor jasa, pendidikan, perdagangan, pariwisata, dan aktivitas perkotaan, dengan basis industri pengolahan yang relatif lebih kecil. Dari sisi kualitas sumber daya manusia, DI Yogyakarta memiliki IPM sebesar 82,48 pada 2025, tertinggi kedua setelah DKI Jakarta, serta Harapan Lama Sekolah tertinggi di Pulau Jawa sebesar 15,78 tahun. Pengeluaran per kapita juga mencapai sekitar Rp15,86 juta pada 2025, tertinggi kedua setelah Jakarta. Karakter tersebut memberikan basis yang cukup baik bagi pengembangan produk asuransi ritel, jiwa, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan jangka panjang.

6.4.1 Lanskap Industri Asuransi Umum dan Jiwa di Provinsi DI Yogyakarta

Tabel 6.7 Lanskap Industri Asuransi Umum dan Jiwa di Provinsi DI Yogyakarta

Asuransi Umum	Asuransi Jiwa
Pasar asuransi umum DI Yogyakarta relatif kecil dan menunjukkan tren penurunan premi. Namun, sisi klaim menunjukkan perubahan yang jauh lebih tajam. Rasio klaim gabungan asuransi umum meningkat dari sekitar 27,80% pada 2023 menjadi 113,76% pada 2025, sehingga nilai klaim telah melampaui premi pada tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan tingginya volatilitas risiko pada portofolio asuransi umum dan menjadi sinyal penting bagi penguatan underwriting, pricing, serta pengelolaan eksposur risiko.	Pasar asuransi jiwa DI Yogyakarta relatif kecil secara nominal, tetapi menunjukkan pemulihan pada 2025. Pada sisi klaim, nilai klaim jiwa konvensional terpantau meningkat. Jika lini konvensional dan syariah digabungkan, rasio klaim jiwa meningkat dari sekitar 64,93% pada 2023 menjadi 92,48% pada 2025, menunjukkan semakin tingginya tekanan klaim terhadap penerimaan premi.

Secara relatif terhadap ukuran ekonominya, posisi DI Yogyakarta cukup menarik. Penetrasi asuransi mencapai sekitar 0,78% pada 2025**,** tertinggi di antara lima provinsi di luar DKI Jakarta, meskipun menurun dari 1,39% pada 2023. Sementara itu, premi per kapita berada pada sekitar Rp0,43 juta pada 2024–2025**,** turun dari Rp0,67 juta pada 2023. Artinya, walaupun ukuran pasar secara nominal kecil, penggunaan asuransi relatif terhadap skala ekonomi Yogyakarta masih lebih tinggi dibandingkan sebagian besar provinsi lain di Jawa.

6.4.2 Peluang dan Tantangan Asuransi di Provinsi DI Yogyakarta

Peluang dan tantangan untuk industri asuransi di Provinsi DI Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel 6.8 Peluang dan Tantangan Asuransi di Provinsi DI Yogyakarta

Peluang	Tantangan
• Kualitas sumber daya manusia dan daya beli yang relatif tinggi menjadi basis kuat bagi pengembangan asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, dan perencanaan keuangan jangka panjang. IPM DI Yogyakarta mencapai 82,48 pada 2025, Harapan Lama Sekolah sebesar 15,78 tahun, dan pengeluaran per kapita sekitar Rp15,86 juta, menunjukkan pasar yang relatif matang untuk produk proteksi berbasis kebutuhan keluarga dan siklus hidup. • Penetrasi asuransi sebesar 0,78% pada 2025 merupakan yang tertinggi di luar DKI Jakarta, menunjukkan tingkat integrasi pasar asuransi dengan ekonomi daerah yang relatif lebih baik dibandingkan provinsi lain di Jawa. Kondisi ini memberikan peluang untuk memperdalam pasar melalui cross-selling, produk perlindungan tambahan, serta produk yang lebih terpersonalisasi. • Karakter ekonomi berbasis jasa, pendidikan, pariwisata, dan aktivitas perkotaan membuka peluang bagi produk asuransi perjalanan, kesehatan, kecelakaan diri, event insurance, property, kendaraan, serta perlindungan usaha skala kecil dan menengah. Selain itu, TPAK yang mencapai 74,74% menunjukkan	• Tekanan klaim asuransi umum meningkat sangat tajam, dengan rasio klaim gabungan mencapai sekitar 113,76% pada 2025. Kondisi ini menunjukkan pembayaran klaim telah melebihi penerimaan premi dan memerlukan evaluasi lebih mendalam terhadap pricing, seleksi risiko, struktur manfaat, dan cadangan teknis. • Penetrasi dan premi per kapita sama-sama menurun dibandingkan 2023. Penetrasi turun dari 1,39% menjadi 0,78%, sementara premi per kapita turun dari Rp0,67 juta menjadi Rp0,43 juta. Hal ini menunjukkan bahwa pasar belum mampu mempertahankan momentum pertumbuhan relatif terhadap ekonomi maupun penduduk. • Struktur ketenagakerjaan masih menyisakan informalitas yang cukup tinggi, karena tenaga kerja formal baru sekitar 46,03% pada 2025. Hal ini dapat membatasi kemampuan sebagian masyarakat untuk membayar premi secara reguler dan menuntut desain produk yang fleksibel, sederhana, serta sesuai dengan pola pendapatan yang tidak selalu tetap. • Risiko bencana tetap perlu diperhitungkan, meskipun jumlah kejadian lebih rendah dibanding Jawa

basis penduduk aktif secara ekonomi yang luas untuk pengembangan produk ritel. • Profil pendidikan tenaga kerja yang relatif tinggi juga membuka peluang bagi distribusi digital dan produk yang membutuhkan tingkat literasi finansial lebih tinggi. Proporsi tenaga kerja lulusan S1/profesi mencapai 9,41%, sementara S2/S3 mencapai 1,32%, termasuk yang tertinggi di Pulau Jawa.	Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Pada 2025 tercatat sekitar 55 kejadian bencana, terutama cuaca ekstrem dan banjir. Risiko tersebut relevan bagi asuransi properti, kendaraan, perjalanan, dan kegiatan usaha berbasis pariwisata.

6.5 Provinsi Jawa Timur: *Diversified Industry & Trade Market*

Jawa Timur merupakan salah satu pusat ekonomi utama di Pulau Jawa dengan struktur ekonomi yang relatif terdiversifikasi. Industri pengolahan memberikan kontribusi sekitar 31,31% pada 2025, sedangkan sektor perdagangan besar dan eceran memiliki kontribusi sekitar 18,55%, tertinggi di antara provinsi di Pulau Jawa. Kombinasi basis industri, perdagangan, logistik, konsumsi, dan aktivitas usaha yang besar menciptakan kebutuhan perlindungan yang luas, baik terhadap aset dan kegiatan usaha maupun terhadap risiko rumah tangga. Namun demikian, tingginya aktivitas ekonomi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kedalaman pasar asuransi. Penetrasi asuransi Jawa Timur turun dari sekitar 0,87% pada 2023 menjadi 0,51% pada 2025, sementara premi per kapita turun dari sekitar Rp0,62 juta menjadi Rp0,42 juta pada periode yang sama.

6.5.1 Lanskap Industri Asuransi Umum dan Jiwa di Provinsi Jawa Timur

Tabel 6.9 Lanskap Industri Asuransi Umum dan Jiwa di Provinsi Jawa Timur

Asuransi Umum	Asuransi Jiwa
Pasar asuransi umum Jawa Timur memiliki basis ekonomi yang kuat, namun premi konvensional menunjukkan tren penurunan selama periode pengamatan. Secara gabungan, rasio klaim asuransi umum berada pada sekitar 52,55% pada 2025, relatif terkendali. Namun, pada lini syariah terdapat tekanan yang lebih tinggi karena rasio klaim mencapai sekitar	Jawa Timur merupakan salah satu pasar asuransi jiwa terbesar di Pulau Jawa setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Rasio klaim jiwa gabungan relatif stabil pada kisaran tinggi, yaitu sekitar 85,21% pada 2025, menunjukkan bahwa pasar memiliki skala besar tetapi sebagian besar penerimaan premi masih diikuti pembayaran klaim yang relatif tinggi.

113,96%, yang berarti pembayaran klaim telah melampaui penerimaan premi pada lini tersebut.	

6.5.2 Peluang dan Tantangan Asuransi di Provinsi Jawa Timur

Peluang dan tantangan untuk industri asuransi di Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

Tabel 6.10 Peluang dan Tantangan Asuransi di Provinsi Jawa Timur

Peluang	Tantangan
• Basis industri pengolahan yang mencapai sekitar 31,31% dan perdagangan sebesar 18,55% menciptakan pasar potensial yang besar bagi asuransi umum. Aktivitas manufaktur, perdagangan, pergudangan, logistik, transportasi, dan distribusi membuka ruang bagi produk *property insurance*, kendaraan komersial, *marine cargo*, *engineering insurance*, *business interruption*, serta perlindungan rantai pasok. • Besarnya basis penduduk produktif memberikan ruang pengembangan pasar ritel. TPAK Jawa Timur mencapai sekitar 73,98% pada 2025, sehingga terdapat basis konsumen yang luas untuk produk asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan diri, pendidikan, proteksi pendapatan, dan perencanaan pensiun. • Skala pasar jiwa Jawa Timur sudah relatif besar, dengan premi konvensional sekitar Rp13,09 triliun pada 2025. Hal ini memberikan basis bagi strategi *cross-selling* dan peningkatan kedalaman perlindungan, bukan hanya ekspansi jumlah nasabah. Produk kesehatan	• Penetrasi asuransi terus menurun, dari sekitar 0,87% pada 2023 menjadi hanya 0,51% pada 2025. Premi per kapita juga turun dari Rp0,62 juta menjadi Rp0,42 juta. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan industri belum mampu mengikuti skala dan pertumbuhan aktivitas ekonomi Jawa Timur secara proporsional. • Tingkat formalitas tenaga kerja masih rendah, dengan pekerja formal hanya sekitar 38,27% pada 2025, terendah di antara enam provinsi yang dianalisis. Dominasi pekerjaan informal dapat membatasi kemampuan pembayaran premi secara tetap dan menuntut desain produk yang lebih terjangkau, fleksibel, serta sesuai dengan pola pendapatan tidak reguler. • Segmen syariah mengalami tekanan yang cukup besar. Premi jiwa syariah turun tajam, sedangkan rasio klaim asuransi umum syariah mencapai sekitar 113,96% pada 2025. Kondisi ini membutuhkan evaluasi terhadap pricing, underwriting, desain manfaat, dan strategi distribusi agar

tambahan, perlindungan pendapatan, pendidikan, dan pensiun memiliki ruang untuk dikembangkan sesuai kebutuhan rumah tangga perkotaan maupun kelompok pekerja produktif. • Tingginya eksposur risiko bencana sekaligus menciptakan kebutuhan proteksi yang nyata. Jawa Timur mencatat sekitar 390 kejadian bencana pada 2025**, t**erutama banjir dan cuaca ekstrem. Kondisi ini membuka peluang bagi perlindungan properti, usaha, pertanian, kendaraan, serta pengembangan produk berbasis risiko bencana.	segmen syariah dapat berkembang secara berkelanjutan. • Tingginya frekuensi bencana meningkatkan risiko kerugian dan volatilitas klaim. Karena itu, ekspansi produk terkait properti dan kegiatan usaha perlu dibarengi pemetaan risiko wilayah, pricing berbasis risiko, diversifikasi portofolio, dan penguatan mekanisme reasuransi.

6.6 Provinsi Banten: *Industrial & High-Exposure Market*

Banten merupakan salah satu wilayah penting dalam koridor ekonomi Pulau Jawa karena memiliki basis industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, kawasan industri, serta keterhubungan ekonomi yang kuat dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat. Pada 2025, kontribusi industri pengolahan berada di kisaran 30,48%, sedangkan sektor konstruksi mencapai sekitar 11,81%, menjadikan Banten salah satu wilayah dengan aktivitas industri dan pembangunan fisik yang cukup intensif. Karakter tersebut menciptakan kebutuhan perlindungan yang besar terhadap aset industri, proyek, kendaraan, logistik, properti, serta berbagai risiko operasional. Namun, perkembangan industri asuransi belum sepenuhnya mengikuti potensi tersebut, tercermin dari penurunan penetrasi asuransi dari sekitar 1,14% pada 2023 menjadi 0,63% pada 2025.

6.6.1 Lanskap Industri Asuransi Umum dan Jiwa di Provinsi Banten

Tabel 6.11 Lanskap Industri Asuransi Umum dan Jiwa di Provinsi Banten

Asuransi Umum	Asuransi Jiwa
Pasar asuransi umum Banten relatif lebih kecil dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Timur, namun menunjukkan tanda pemulihan pada 2025. Klaim asuransi umum konvensional turun menjadi	Asuransi jiwa Banten menunjukkan tren pelemahan yang lebih jelas. Premi jiwa konvensional turun secara konsisten. Pada saat yang sama, klaim jiwa konvensional masih mencapai sekitar

sekitar Rp0,80 triliun pada 2025. Secara gabungan, rasio klaim asuransi umum berada pada sekitar 48,70%, sehingga secara keseluruhan tekanan klaim masih relatif terkendali. Namun, lini syariah menunjukkan volatilitas yang sangat tinggi, dengan rasio klaim mencapai sekitar 205,98% pada 2025, tertinggi di antara seluruh provinsi yang dianalisis.	Rp4,62 triliun pada 2025, sehingga rasio klaim konvensional mencapai sekitar 120,73%. Tekanan lebih tinggi terlihat pada lini syariah, dengan premi hanya sekitar Rp0,14 triliun pada 2025, sementara rasio klaim mencapai 162,73%. Jika konvensional dan syariah digabungkan, rasio klaim jiwa Banten mencapai 122,21% pada 2025, tertinggi di Pulau Jawa dan menunjukkan bahwa pembayaran klaim telah melampaui penerimaan premi.

6.6.2 Peluang dan Tantangan Asuransi di Provinsi Banten

Peluang dan tantangan untuk industri asuransi di Provinsi Banten sebagai berikut :

Tabel 6.12 Peluang dan Tantangan Asuransi di Provinsi Banten

Peluang	Tantangan
• Basis industri dan konstruksi yang kuat memberikan peluang besar bagi pengembangan asuransi umum. Kontribusi industri pengolahan sekitar 30,48% dan konstruksi sekitar 11,81% pada 2025 menciptakan kebutuhan perlindungan terhadap pabrik, mesin, proyek, properti, gudang, kendaraan komersial, serta risiko operasional dan gangguan usaha. • Keterhubungan Banten dengan kawasan metropolitan Jabodetabek serta konsentrasi kawasan industri membuka peluang bagi pengembangan produk korporasi yang terintegrasi dengan pembiayaan, logistik, transportasi, properti, dan rantai pasok. Posisi ini memungkinkan perusahaan asuransi memanfaatkan pasar Banten tidak	• Pasar asuransi jiwa menghadapi tekanan klaim yang sangat tinggi. Rasio klaim jiwa gabungan mencapai sekitar 122,21% pada 2025, tertinggi di Pulau Jawa, sementara rasio lini jiwa syariah mencapai sekitar 162,73%. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi underwriting, pricing, desain produk, serta kualitas portofolio secara lebih mendalam. • Penetrasi asuransi menurun cukup besar, dari sekitar 1,14% pada 2023 menjadi 0,63% pada 2025. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan kegiatan ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh perkembangan premi secara proporsional. • Premi jiwa konvensional terus menurun, sehingga Banten menghadapi kombinasi antara

hanya sebagai pasar ritel, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem bisnis regional yang lebih luas.

- Pemulihan premi asuransi umum konvensional pada 2025 dapat menjadi indikasi awal bahwa pasar non-jiwa masih memiliki ruang pertumbuhan. Ekspansi dapat diarahkan pada *property*, *engineering*, kendaraan, marine cargo, liability, dan perlindungan proyek yang relevan dengan karakter ekonomi Banten.
- Segmen ritel tetap memiliki ruang pengembangan, terutama karena Banten memiliki kawasan perkotaan, pekerja industri, pekerja formal, serta aktivitas komuter yang besar. Produk jiwa sederhana, kesehatan tambahan, kecelakaan diri, kendaraan, dan proteksi pendapatan dapat dikembangkan dengan distribusi berbasis tempat kerja, perbankan, maupun kanal digital.

penyusutan basis premi dan tingginya tekanan klaim. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan pertumbuhan pasar jiwa.

- Segmen asuransi syariah menunjukkan risiko keberlanjutan yang cukup besar. Premi jiwa syariah turun dari Rp1,33 triliun pada 2023 menjadi Rp0,14 triliun pada 2025, sementara pada asuransi umum syariah rasio klaim mencapai sekitar 205,98%. Hal ini menunjukkan perlunya restrukturisasi portofolio dan penyesuaian strategi produk agar pertumbuhan segmen syariah tidak menimbulkan tekanan finansial yang berlebihan.

7. SINTESIS DAN REKOMENDASI STRATEGIS WILAYAH DI PULAU JAWA

Secara umum, perekonomian enam provinsi di Pulau Jawa menunjukkan fundamental yang relatif kuat. Pada 2025, seluruh provinsi mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 5%, dengan kisaran 5,21–5,49%. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tersebut tidak selalu diikuti oleh perkembangan premi yang searah. DKI Jakarta, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta masih mencatat pertumbuhan premi positif masing-masing sebesar 3,17%, 1,20%, dan 0,89%, sedangkan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten mengalami kontraksi premi masing-masing sebesar -14,96%, -5,32%, dan -10,81%. Temuan ini menunjukkan bahwa ekspansi ekonomi regional belum secara otomatis terkonversi menjadi peningkatan permintaan dan pemanfaatan produk asuransi.

Kondisi tersebut juga tercermin dari analisis keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan premi. Pada 2025, hubungan keduanya cenderung negatif dan relatif lemah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya faktor yang menentukan perkembangan pasar asuransi. Struktur ekonomi, tingkat pendapatan, distribusi pendapatan, formalitas tenaga kerja, kepemilikan aset, akses terhadap layanan keuangan, serta karakteristik pasar masing-masing wilayah perlu dipertimbangkan secara bersamaan.

Dari perspektif kedalaman pasar, terlihat kesenjangan yang sangat besar antarwilayah. DKI Jakarta memiliki penetrasi sebesar 4,09% pada 2025 dan tetap menjadi pusat pasar asuransi Pulau Jawa. Sebaliknya, penetrasi di luar Jakarta berada di bawah 1%, yaitu DI Yogyakarta 0,78%, Jawa Barat 0,72%, Banten 0,63%, Jawa Timur 0,51%, dan Jawa Tengah hanya 0,39%. Bahkan seluruh provinsi mengalami penurunan penetrasi dibandingkan 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Pulau Jawa masih memiliki ruang cukup besar untuk pendalaman pasar asuransi, terutama provinsi dengan basis ekonomi dan penduduk yang besar tetapi tingkat penetrasinya masih rendah.

Perbedaan karakter ekonomi regional juga menghasilkan potensi kebutuhan asuransi yang berbeda. Jawa Barat dan Jawa Tengah memiliki basis manufaktur yang kuat, Jawa Timur menonjol pada kombinasi industri dan perdagangan, sementara Banten memiliki karakter industri dan konstruksi yang kuat. DKI Jakarta lebih dominan sebagai pusat jasa, bisnis, keuangan, dan aktivitas korporasi, sedangkan DI Yogyakarta memiliki karakter ekonomi berbasis jasa, pendidikan, pariwisata, dan

aktivitas perkotaan. Oleh karena itu, strategi pengembangan pasar tidak dapat diterapkan secara seragam pada seluruh wilayah.

Perbedaan juga terlihat antara lini asuransi umum dan asuransi jiwa. Hasil analisis menunjukkan bahwa kredit modal kerja dan kredit investasi memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan premi asuransi umum karena aktivitas pembiayaan produktif berkaitan langsung dengan kepemilikan aset dan eksposur risiko kegiatan usaha. Sebaliknya, hubungan kredit konsumsi dengan premi jiwa lebih lemah, karena keputusan masyarakat membeli asuransi jiwa lebih berkaitan dengan pendapatan, formalitas pekerjaan, karakteristik rumah tangga, kesadaran terhadap risiko, dan kemampuan melakukan perencanaan keuangan jangka panjang.

Di sisi risiko, kualitas pertumbuhan industri juga perlu menjadi perhatian. Tekanan klaim tidak seragam antarprovinsi maupun antarjenis asuransi. Banten menghadapi tekanan paling besar pada asuransi jiwa, dengan rasio klaim jiwa gabungan mencapai 122,21% pada 2025. Sementara itu, pada asuransi umum, DI Yogyakarta mencatat rasio klaim gabungan 113,76%, sedangkan lini umum syariah menunjukkan tekanan tinggi di Jawa Timur dan Banten. Temuan tersebut menegaskan bahwa strategi ekspansi pasar perlu berjalan beriringan dengan penguatan underwriting, pricing, pengelolaan portofolio, dan mitigasi risiko.

Berdasarkan sintesis tersebut, rekomendasi strategis pengembangan industri asuransi di Pulau Jawa dapat dirumuskan sebagai berikut.

Tabel 7.1 Sintesis dan Rekomendasi Strategis Wilayah di Pulau Jawa

Provinsi	Kondisi Makro	Peluang	Tantangan	Rekomendasi Aksi / Produk
DKI Jakarta	• Pusat ekonomi, bisnis, dan jasa keuangan nasional.- PDRB per kapita sangat tinggi (±Rp212 juta). • Penetrasi asuransi tertinggi di Jawa (4,09%), tetapi cenderung menurun. • Ketimpangan masih tinggi	• Pasar asuransi paling dalam dan matang di Pulau Jawa. • Potensi kuat untuk asuransi umum korporasi, properti, liability, engineering, dan cyber risk. • Peluang besar pada embedded insurance, bancassurance digital, health insurance, dan	• Penetrasi menurun meskipun skala ekonomi besar. • Pasar cenderung terkonsentrasi pada korporasi dan kelompok pendapatan tinggi. • Segmen jiwa dan syariah menunjukkan perlambatan; tekanan inflasi medis	• Fokus pada pendalaman pasar, bukan sekadar ekspansi volume. • Prioritas pada produk korporasi bernilai tinggi, health & retirement products, embedded insurance, serta produk ritel sederhana untuk memperluas

	(Gini Ratio 0,423).	retirement planning.	juga meningkat.	inklusi pasar menengah.
Jawa Barat	• Basis industri pengolahan terkuat di Jawa (±40,41%). • Penduduk sangat besar, kawasan industri dan investasi kuat. • Penetrasi asuransi rendah (0,72%) dan premi per kapita relatif kecil.	• Potensi besar untuk asuransi umum berbasis manufaktur, kawasan industri, logistik, kendaraan komersial, dan marine cargo. • Pasar ritel besar untuk asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, dan mikroasuransi • Ruang besar untuk perluasan basis pemegang polis.	• Besarnya ekonomi belum terkonversi menjadi kedalaman pasar asuransi. • Premi jiwa menurun selama 2023–2025. • Segmen syariah mengalami kontraksi tajam.	• Prioritas pada ekspansi pasar industrial insurance dan employee-based insurance. • Kembangkan produk ritel mass market, distribusi lewat perbankan, digital, dan tempat kerja, serta revitalisasi produk syariah dengan desain yang lebih relevan.
Jawa Tengah	• Industri pengolahan kuat (±33,39%) dan konstruksi relatif tinggi. • TPAK tinggi (74,36%), tetapi pekerja formal masih terbatas (41,21%). • Penetrasi asuransi terendah di Jawa (0,39%).	• Potensi untuk asuransi umum berbasis manufaktur, konstruksi, dan aset produktif. • Peluang besar pada asuransi mikro, UMKM, pertanian, dan perlindungan pekerja informal. • Basis penduduk produktif dan wilayah	• Pasar sangat dangkal dibanding potensi ekonominya. • Kemampuan bayar premi dibatasi informalitas tenaga kerja. • Risiko bencana cukup tinggi dan dapat meningkatkan tekanan klaim.	Fokus pada produk sederhana dan terjangkau, seperti mikroasuransi, proteksi kecelakaan, usaha mikro, dan asuransi berbasis komunitas. Distribusi diperkuat melalui koperasi, BPR, agen lokal, dan kanal digital.

		perdesaan luas.		
DI Yogyakarta	• Ekonomi didorong oleh jasa, pendidikan, pariwisata, dan aktivitas perkotaan. • IPM tinggi (82,48), Harapan Lama Sekolah tertinggi di Jawa. • Penetrasi asuransi relatif tinggi di luar DKI (0,78%).	• Potensi untuk asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, dan perencanaan keuangan keluarga. • Peluang pada travel insurance, event insurance, proteksi UMKM, dan usaha jasa. • Literasi pendidikan relatif tinggi mendukung distribusi digital dan produk personalisasi.	• Rasio klaim asuransi umum melonjak sangat tinggi (113,76%). • Penetrasi dan premi per kapita menurun dibanding 2023. • Struktur tenaga kerja masih menyisakan informalitas.	Strategi diarahkan pada pendalaman pasar ritel melalui produk pendidikan, kesehatan, perjalanan, dan perlindungan usaha jasa. Perlu penguatan underwriting, pricing, dan manajemen klaim, khususnya pada lini umum.
Jawa Timur	• Ekonomi relatif terdiversifikasi ; industri pengolahan (±31,31%) dan perdagangan (±18,55%) sangat kuat. • TPAK tinggi (73,98%), tetapi pekerja formal relatif rendah (38,27%). • Penetrasi asuransi masih rendah (0,51%).	• Potensi besar untuk asuransi umum berbasis industri, perdagangan, logistik, distribusi, dan rantai pasok. • Pasar jiwa cukup besar untuk pengembangan proteksi keluarga, pendidikan, dan kesehatan. • Risiko bencana membuka ruang bagi produk proteksi	• Kedalaman pasar masih rendah dibanding basis ekonomi. • Tingginya informalitas membatasi perluasan asuransi jiwa reguler. • Segmen syariah mengalami tekanan, termasuk rasio klaim umum syariah yang tinggi.	Fokus pada asuransi umum untuk perdagangan, logistik, transportasi, dan aset usaha, disertai produk jiwa sederhana dan fleksibel untuk rumah tangga produktif. Segmen syariah perlu restrukturisasi portofolio dan penguatan distribusi.

		properti, usaha, dan pertanian.		
Banten	• Basis industri dan konstruksi kuat; terhubung erat dengan kawasan Jabodetabek. • Industri pengolahan sekitar 30,48% dan konstruksi ±11,81%. • Penetrasi asuransi menurun menjadi 0,63%.	• Peluang besar pada asuransi umum untuk industri, proyek, properti, gudang, logistik, dan kendaraan komersial. • Kawasan industri dan komuter memberi peluang untuk asuransi berbasis tempat kerja. • Premi umum mulai menunjukkan pemulihan.	• Tekanan klaim jiwa paling berat di Jawa; rasio klaim jiwa gabungan mencapai 122,21%. • Segmen syariah sangat rentan, termasuk rasio klaim umum syariah yang sangat tinggi. • Premi jiwa terus menurun selama tiga tahun.	Prioritas pada penguatan underwriting dan risk management, terutama untuk asuransi jiwa dan syariah. Ekspansi diarahkan ke asuransi umum berbasis industri, konstruksi, properti, dan proyek, serta produk payroll/employee insurance untuk pekerja kawasan industri.